

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

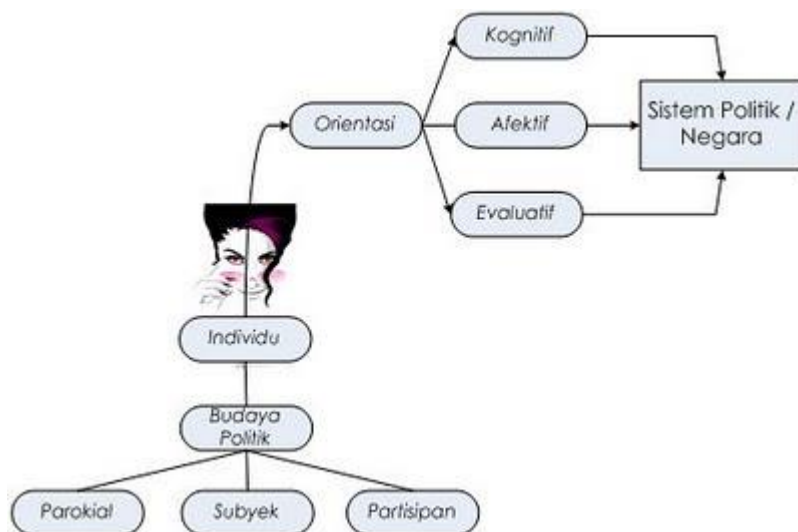
Masyarakat Air Tiris merupakan masyarakat yang homogin, seluruh masyarakatnya menganut agama Islam. Termasuk masyarakat Islam/santri yang antusias dalam menggunakan hak pilih mereka dalam setiap pemilihan umum. Dalam masyarakat Air Tiris dapat dikatakan bahwa kaum santri merupakan bagian terbesar atau mayoritas. Mereka, pada umumnya, berusaha melandasi kehidupannya pada ajaran Islam. Tingkah laku sosial politik mereka mencerminkan ajaran agama Islam. Mereka mempercayai semangat ukhuwah Islamiyah, dan salah satu perwujudan ukhuwah tersebut adalah memiliki orientasi politik yang mendukung partai politik Islam dan atau organisasi-organisasi sosial yang menunjukkan simbol-simbol Islam.

Dalam kehidupan politik, orientasi politik merupakan penentu masyarakat dalam partisipasi politiknya, termasuk dalam menentukan pilihan terhadap partai pada pemilihan umum. Kata orientasi mengandung pengertian peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dan sebagainya) yang tepat dan benar¹. Orientasi/kecenderungan individu terhadap sistem politik terbagi menjadi tiga², yaitu: 1) orientasi kognitif adalah orientasi berdasarkan pengetahuan. Bagaimana individu mengetahui hak dan kewajiban warga negara di dalam konstitusi, bagaimana individu mengetahui tata cara pemilihan umum, bagaimana individu mengetahui partai politik dan aktivitas partai

¹<https://kbbi.web.id/orientasi>

²setabasri01.blogspot.co.id/2009/budaya-dan-sosialisasi-politik.html

tersebut, bagaimana individu mengetahui perilaku pemimpin-pemimpin mereka lewat pemberitaan massa, merupakan contoh dari orientasi kognitif ini. Pengetahuan-pengetahuan ini bersifat tidak tetap. Pengetahuan bertambah atau tetap seiring dengan pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekeliling individu. 2) Orientasi afektif. Berbeda dengan orientasi kognitif,



orientasi afektif ini bergerak di dalam konteks perasaan. Perasaan-perasaan seperti diperhatikan, diuntungkan, merasa adil, sejahtera, suka atau tidak suka, ataupun sejenisnya, kerap lebih menentukan ketimbang faktor pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin negara yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis (sifatnya populer) untuk mendongkrak aspek afektif warga negara. Di Indonesia, kebijakan-kebijakan seperti Bantuan Langsung Tunai, Askeskin, Pembagian Kompor Gas, dan

sejenisnya bertujuan demi mengubah orientasi afektif warga negaranya. Tujuan akhirnya adalah, agar masyarakat merasa diperhatikan oleh pimpinan politik, dan mereka akan memilih para pemberi bantuan di kemudian hari. 3) Orientasi evaluatif merupakan campuran antara orientasi kognitif dan afektif di dalam bentuk keputusan/tindakan. Misalnya, setelah mengetahui bahwa partai A atau B memang benar menyuarakan apa yang mereka inginkan, individu memilih mereka di dalam suatu pemilu. Atau, sekelompok individu menggelar unjuk rasa untuk mendukung seorang calon yang tengah 'diserang' oleh lawan politiknya, semata-mata karena mereka merasa kenal dan sedikit tahu akan jati diri si politisi termaksud. Orientasi evaluatif muncul akibat adanya pengaruh dari orientasi kognitif dan afektif. Dalam tulisan ini, orientasi politik masyarakat Air Tiris adalah kecenderungan masyarakat Air Tiris dalam menentukan pilihan terhadap partai politik pada pemilihan umum legislatif.

Partai politik Islam adalah pertama, partai politik yang secara tegas mencantumkan asasnya adalah Islam. Pada pemilu tahun 1999, paling tidak ada delapan partai yang berasaskan Islam, antara lain yang mendapatkan kursi di DPR pada saat ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Nahdatul Ummat (PNU), Partai Kebangkitan Ummat (PKU), Partai Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan lain-lain. Kedua, disamping partai yang berasaskan Islam, adalah partai yang bebasiskan massa Islam. Sebagai contoh yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional. Kedua partai yang terakhir ini massa pendukungnya terutama berasal dari para anggota dan simpatisan ormas Islam Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, walaupun tidak

seluruhnya anggota kedua organisasi tersebut menjadi anggota kedua partai itu³. Lahirnya partai berasaskan Islam dan partai yang berbasiskan massa Islam, sejak tahun 1998, yaitu setelah tumbanganya Orde Baru.

Menurut Azyumardi Azra⁴, politik Islam kontemporer dapat dilihat dari beberapa kriteria. Pertama, pencantuman Islam sebagai azas partai. Kedua, penggunaan simbol-simbol yang identik atau secara dekat diasosiasikan dengan Islam, seperti “bulan-bintang”, “ka’bah”, “kalimat atau tulisan Arab”, dan sebagainya. Ketiga, memiliki basis sosial utama dari kalangan Islam tertentu. Partai Islam juga ditandai oleh adanya personalia kepemimpinan partai yang didominasi oleh orang-orang yang berlatar belakang Islam yang kuat (santri) serta pengambilan keputusan yang cenderung memihak kepada kepentingan unsur Islam.

Partisipasi politik masyarakat Islam menjadi penting dalam setiap proses pemilihan umum, setidaknya dapat ditandai dari keterlibatan individu atau kelompok dalam berbagai tingkatan di dalam sistem politik yang sedang berlangsung. Keterlibatan ini dapat diidentifikasi pada dua bentuk, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif dapat dicirikan dengan, meminjam istilah Michael Rush, sikap masyarakat yang selalu disibukkan dengan diskusi politik informal oleh individu-individu, baik itu di lingkungan keluarga, tempat bekerja, atau segala tempat yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan. Sedangkan partisipasi pasif adalah kelompok masyarakat

³<https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/10/13/partai-politik-islam-dalam-peta-politik-indonesia/>

⁴Azyumardi Azra, “Islam Politik pada Masa Pasca Soeharto”. Kata Pengantar untuk AM. Fatwa, Satu Islam Multi Partai (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 13.

yang sangat sedikit membicarakan diskursus politik, tetapi tetap saja memiliki minat terhadap perkembangan politik.

Penelitian dalam disertasi ini membahas tentang keterlibatan masyarakat Islam dalam demokrasi Indonesia, khususnya masyarakat Islam di pedesaan Sumatera, masyarakat Air Tiris, menyangkut keterlibatan mereka dalam pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014. Secara umum berusaha menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan umum. Salah satu masyarakat Islam kelurahan di kabupaten Kampar Propinsi Riau, yaitu masyarakat Air Tiris, sebagai masyarakat yang diteliti.

Dinamika partai politik pada masyarakat pedesaan menjadi penelitian yang menarik, sebagai salah satu yang utama dalam perwujudan hak politik masyarakat, termasuk masyarakat Air Tiris. Dinamika partai politik masyarakat pedesaan merupakan gerak kehidupan partai politik secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan partai politik tersebut pada masyarakat pedesaan.

Pelaksanaan hak politik yang lebih leluasa telah terjadi, sejak awal tahun 1998, di mana masyarakat terlepas dari kondisi politik yang terpusat. Keadaan ini menandai diperolehnya hak politik yang lebih bebas. Dalam kondisi demikian kehidupan partai politik memiliki keleluasaan. Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai politik lama yang seolah memperoleh energi baru yang membuat optimisme akan diperolehnya kemajuan dan menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, munculnya optimisme akan memperoleh dukungan masyarakat lebih luas. Juga dimungkinkan berdirinya partai-partai politik baru, termasuk partai-partai politik agama/Islam.

Pada negara dengan sistem politik demokratik, perilaku politik warga negara di antaranya dalam bentuk partisipasinya dalam pemilihan umum, yaitu kegiatan memberikan suara kepada calon-calon yang diajukan oleh partai-partai politik, yang diajukan secara periodik untuk mengisi jabatan-jabatan politik pada pemerintahan. Dalam hal ini Powel⁵ mengemukakan sebagai berikut: *“participation by citizens in competitive elections is distinctive feature of democratic politics”*. (“partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang kompetitif merupakan ciri mendasar dari sistem politik demokratik”)

Secara tradisional masyarakat santri Air Tiris orientasi politiknya cenderung menjatuhkan pilihan mereka pada partai-partai politik agama/Islam. Namun, orientasi politik demikian mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup dinamis. Dinamika orientasi politik masyarakat Air Tiris dalam internal partai-partai Islam cukup tinggi, sementara dinamika orientasi masyarakat Air Tiris terhadap partai-partai politik Islam juga cukup tinggi dihadapkan pada partai-partai politik non agama/Islam.

Pemilihan umum tahun 1999, pemilihan umum pertama era reformasi yang diikuti 48 partai politik, memunculkan enam partai pemenang. PAN, sebagai partai baru, tampil sebagai pemenang dengan mengantongi suara 43,84 %, disusul oleh PPP dengan memperoleh 35,11 %, naik satu persen dibanding pemilihan umum tahun 1997. Partai Golkar mengalami kemerosotan tajam dibanding perolehan suara pada pemilihan umum 1997, dengan hanya memperoleh 11,19 % suara. PDIP tak beranjak dan memperoleh 2,28 % suara. Di samping PAN,

⁵G. Bingham Powell, Jr., *Contemporary Democratic Participation, Stability and Violence* (Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press, 1982), hlm. 12.

partai baru yang memperoleh suara adalah Partai Keadilan (PK) dan Partai Bulan Bintang (PBB). PK memperoleh suara 4,66 % dan PBB 2,92 % suara. Dalam pemilihan umum ini kelompok partai Islam memperoleh 86,53 % suara dan partai non Islam memperoleh 13,47 % suara.

Pemilihan umum tahun 2004 menunjukkan fenomena baru. Partai politik baru yang didirikan oleh ulama kondang KH. Zainuddin MZ, Partai Bintang Reformasi (PBR), tampil sebagai pemenang dengan memperoleh suara 41,00 %. PPP mengalami penurunan drastis dan hanya memperoleh 11,6 % suara, Partai Golkar tak beranjak dari perolehan suara pemilihan umum sebelumnya, memperoleh suara 10,9 %. PDIP bersama dengan partai lainnya, termasuk Partai Demokrat (PD) hanya memperoleh 8,80 % suara. PBB mengalami peningkatan menjadi 8,7 % suara, PKS juga mengalami peningkatan menjadi 9,3 % suara. Sementara PAN yang pada pemilihan umum 1999 tampil sebagai pemenang, pada pemilihan umum 2004 ini mengalami penurunan yang tajam dan hanya memperoleh 9,7 % suara. Dalam pemilihan umum ini kelompok partai Islam memperoleh 80,30 % suara dan partai non Islam memperoleh 19,70 % suara.

Pemilihan umum 2009 mengembalikan Partai Golkar menjadi pemenang seperti pada pemilihan umum 1997 dengan meraih 46,22 % suara. PPP mengalami penurunan yang cukup tajam dan hanya meraih 4,7 % suara. PDIP bersama partai lainnya hanya memperoleh 5,7 % suara. PBR mengalami kemerosotan dengan hanya memperoleh 20,3 % suara. PBB dan PKS mengalami penurunan dan masing-masing memperoleh suara 6,3 % dan 7,41 %. PD yang pada pemilihan umum sebelumnya tidak memperoleh simpati masyarakat, pada pemilihan umum 2009 ini

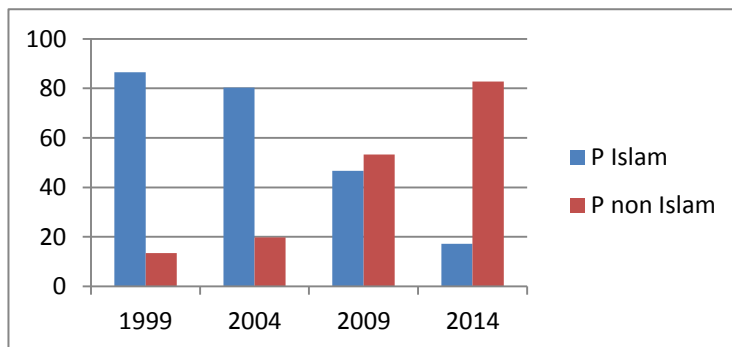
memperoleh suara yang cukup besar yaitu 11,36 %. Dalam pemilihan umum ini kelompok partai Islam memperoleh 46,72 % suara dan partai non Islam memperoleh 63,28 % suara.

Pemilihan umum 2014 merupakan pemilihan umum di mana partai-partai politik Islam mengalami prestasi terburuknya. Pada pemilihan umum ini partai-partai Islam mengalami penurunan perolehan suara yang drastic, hanya memperoleh 17, 2%. Perolehan suara partai-partai politik Islam ini terdiri dari PKB 8,0%, PKS 1,5%, PAN 3,9%, PPP 2,9%, dan PBB 0,9% . Sementara partai-partai politik non Islam perolehan suaranya melejit mencapai 82,8%. Perolehan suara partai-partai politik non Islam ini terdiri dari Partai NasDem 16,6%, PDIP 1,4%, Partai Golkar 56,7%, Partai Gerindra 3,4%, Partai Demokrat 3,2%, Partai Hanura 0,4% dan PKPI 0,1%. Perolehan suara partai-partai non Islam ini merupakan capaian tertinggi dalam pemilihan umum di Air Tiris.

Dinamika perolehan suara partai-partai politik pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014 di kelurahan Air Tiris menunjukkan dinamika “pertarungan” yang ketat. Partai-partai politik silih berganti memenangi pemilihan umum yang diikuti oleh partai-partai aliran keagamaan maupun partai-partai non keagamaan. Perolehan suara partai-partai politik pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014 di kelurahan Air Tiris menunjukkan terjadinya perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris terhadap partai-partai politik Islam. Berturut-turut partai-partai politik Islam besar di Air Tiris pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014 adalah PPP, PAN, PBB, PKB, sementara PKS dan PBB merupakan partai kecil. Sementara dikaitkan dengan dikhotomi partai keagamaan/Islam dan partai non keagamaan, pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan

2014 menunjukkan partai-partai politik Islam dari mayoritas menjadi minoritas yaitu memperoleh suara 86,53%, 80,30%, 46,72% dan 17,2%. Hal ini menunjukkan telah terjadinya perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris terhadap partai-partai politik Islam. Keadaan ini dapat dilihat dalam gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Perubahan Orientasi Politik Masyarakat Air Tiris
Terhadap Partai Politik Islam pada Pemilu 1999, 2004,
2009, 2014



Sumber : Diolah dari PPK Kampar

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :
“Faktor-faktor apa yang menyebabkan orientasi politik masyarakat Air Tiris terhadap partai politik Islam berubah?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris terhadap partai politik Islam.
2. Menemukan perspektif teoritik yang berbeda, memperlemah atau memperkuat perspektif teoritik yang telah ada dalam hubungannya dengan perilaku memilih masyarakat dalam pemilihan umum.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Temuan penelitian ini memperkaya teori-teori tentang partai politik, pemilihan umum dan perilaku memilih.
2. Temuan penelitian ini secara praktis memberikan informasi kepada aktivis dan pemilih dalam pemilihan umum guna menentukan sikap yang menjadi dasar aktifitas mereka dalam partisipasi politik, terutama dalam pemilihan umum.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagai latar belakang, alasan, masyarakat Air Tiris dipilih sebagai obyek penelitian, secara umum terdapat enam hal yang dapat dikemukakan sebagai pertimbangan. Pertama, Air Tiris merupakan salah satu wilayah yang unik, orientasi politik masyarakat terhadap partai-partai politik Islam mengalami perubahan yang dinamis. Bahkan masyarakat yang dalam dua kali pemilihan umum, 1999, 2009, secara mutlak berorientasi dengan partai-partai Islam mengalami perubahan pada pemilihan umum 2009 dan

2014 yaitu berubah berorientasi kepada partai-partai politik non Islam. Kedua, seluruh warga kelurahan Air Tiris menganut agama Islam santri tetapi, akhirnya, pada pemilihan umum 2009 dan 2014 kelompok partai-partai politik Islam mengalami kekalahan.

Ketiga, dalam empat kali pemilihan umum pada penelitian ini muncul tiga partai sebagai pemenang suara mayoritas. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemilihan umum yakni pada pemilihan umum 1999 dimenangkan oleh PAN, pemilihan umum 2004 dimenangkan PBR, pemilihan umum 2009 dimenangkan oleh Partai Golkar, dan pemilihan umum 2014 juga dimenangkan oleh partai Golkar; keempat, masyarakat Air Tiris merupakan satu-satunya masyarakat kelurahan di antara 31 desa/kelurahan yang terdapat di kecamatan Kampar dengan jumlah penduduk sebanyak 5.418 jiwa dan merupakan daerah pemilihan terbanyak yakni 3.850 pemilih pada pemilihan umum 2014. Kondisi ini cukup unik, karena selalu terjadi perubahan perilaku politik pemilih yang ditandai dengan silih bergantinya pemenang dalam pemilihan umum.

Kelima, dibandingkan dengan desa-desa lain di kecamatan Kampar. Kecamatan Kampar terdiri dari kelurahan/desa. Kelurahan dan desa tersebut adalah Air Tiris, satusatunya kelurahan, dan tujuh belas desa, yaitu, Batu Belah, Tanjung Berulak, Ranah, Penyasawan, Rumbio, Padang Mutung, Pulau Jambu, Tanjung Rambutan, Simpang Kubu, Limau Manis, Naumbai, Pulau Tinggi, Ranah Baru, Bukit Ranah, Pulau Sarak, Koto Tibun dan Ranah Singkuang.

Dari 18 kelurahan/desa tersebut, jumlah pemilih terbanyak adalah Air Tiris. Jumlah pemilih pada pemilihan umum 2014 di kecamatan Kampar dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Jumlah Pemilih Kecamatan Kampar
pada Pemilihan Umum 2014

No.	Kelurahan/ Desa	Pemilih		Jumlah Pemilih
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Air Tiris	1.937	1.913	3.850
2.	Penyasawan	1.823	1.864	3.687
3.	Batu Belah	1.819	1.860	3.679
4.	Rumbio	1.130	1.137	2.267
5.	Padang Mutung	1.120	1.089	2.209
6.	Ranah	1.049	1.116	2.165
7.	Tj. Rambutan	818	854	1.672
8.	Simpang Kubu	827	819	1.646
9.	Koto Tibun	784	794	1.578
10.	Limau Manis	786	747	1.533
11.	Tanjung Berulak	753	757	1.510
12.	Bukit Ranah	705	750	1.455
13.	Naumbai	698	695	1.393
14.	Pulau Tinggi	600	650	1.250
15.	Pulau Jambu	629	589	1.218
16.	Ranah Baru	432	454	886
17.	Pulau Sarak	436	444	880
18.	Ranah Singkuang	390	368	758

Sumber : PPK Kecamatan Kampar

Dari 18 kelurahan/desa di kecamatan Kampar, Air Tiris memiliki tingkat partisipasi politik terbesar. Tingkat Partisipasi masyarakat Air Tiris dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Partisipasi Politik Pemilih Kecamatan Kampar
pada Pemilihan Umum 2014

No.	Kelurahan/ Desa	Pemilih		Partisipasi (%)
		Jumlah Pemilih	Menggunakan Hak Pilih	
1.	Air Tiris	3.850	3.536	91,84
2.	Penyasawan	3.687	3.079	83,51
3.	Batu Belah	3.679	2.937	79,80
4.	Rumbio	2.267	1.840	81,20
5.	Padang Mutung	2.209	1.721	77,90
6.	Ranah	2.165	1.653	76,35
7.	Tj. Rambutan	1.672	1.318	78,82
8.	Simpang Kubu	1.646	1.505	91,43
9.	Koto Tibun	1.578	1.288	81,62
10.	Limau Manis	1.533	1.198	78,14
11.	Tanjung Berulak	1.510	1.185	78,47
12.	Bukit Ranah	1.455	1.141	78,42
13.	Naumbai	1.393	1.076	77,24
14.	Pulau Tinggi	1.250	1.048	83,84
15.	Pulau Jambu	1.218	1.013	83,16
16.	Ranah Baru	886	689	77,76
17.	Pulau Sarak	880	689	78,29
18.	Ranah Singkuang	758	666	87,86

Sumber : PPK Kecamatan Kampar

Keenam, pada masa rezim orde baru telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali, tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu-pemilu tersebut, partai pemerintah yakni Golongan Karya muncul sebagai mesin politik baru yang hampir tak

tertandingi yang mendominasi proses politik di Indonesia. Dalam setiap pemilu Golkar mampu meraih suara sekitar 62%, sementara dua partai politik yang lain, yaitu PPP dan PDI masing-masing mengumpulkan suara sekitar 29% dan 9%. Golkar sebagai partai pemerintah muncul sebagai partai hegemoni dan mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah yang bisa memberi kesan bahwa pemilu-pemilu pada masa orde baru tidak fair dan tidak demokratis.

Dalam kondisi demikian menjadikan masyarakat digiring dan dimobilisasi, dengan intimidasi dan berbagai ancaman, untuk memilih dan memenangkan Golkar. Namun demikian terdapat beberapa kelompok pemilih yang tetap konsisten memilih partai-partai bukan partai pemerintah, Golkar. Terutama memperlihatkan loyalitas mereka pada partai-partai Islam, baik di Jawa maupun luar Jawa.

Sebelas dari 37 distrik di Jawa Timur, dan enam dari 35 distrik di Jawa Tengah, partai pemerintah menderita kekalahan dari pemilu ke pemilu. Selain itu terdapat indikasi penurunan popularitas Golkar pada banyak distrik lain di Jawa Timur dan Jawa Barat⁶⁶. Di Sumatera, masyarakat Air Tiris Kampar Riau merupakan salah satu masyarakat pemilih yang pada pemilihan umum orde baru secara konsisten tetap loyal pada partai-partai Islam, bukan partai pemerintah. Sebaliknya, justru pada pemilu era reformasi, dalam pemilu yang lebih demokratis dan fair, loyalitas masyarakat terhadap partai-partai Islam itu berakhir.

Penelitian ini merupakan suatu upaya menjelaskan suatu fenomena perubahan orientasi politik masyarakat

⁶⁶ Afan Gaffar, *Javanese Voters A Case Studi Of Election under aHegemonic Party System* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992) hlm. 3.

pedesaan Sumatera. Pertanyaan yang berusaha diperoleh penjelasannya adalah mengapa masyarakat yang konsisten loyal dan memilih partai-partai Islam kemudian berubah meninggalkannya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan pribadi mengenai hal tersebut dan kemudian membawanya mendukung dan memilih partai lain.

Sementara materi bahasan yang diteliti adalah orientasi politik masyarakat Air Tiris pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014 atau pemilihan umum pada masa rezim reformasi. Rentang waktu penelitian adalah tahun 2009 sampai dengan tahun 2016.

1.6. Penelitian Pustaka dan Kerangka Teori

Penelitian ilmiah memerlukan telaah hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai pembanding dan dari telaah penelitian tersebut dapat memposisikan kecenderungan dari penelitian yang sedang dilakukan. Untuk memberikan arah dan menjaga konsistensi metodologis penelitian diperlukan paparan kerangka teori yang signifikan dengan permasalahan yang dikemukakan.

1.6.1. Penelitian Pustaka

Indonesia sebagai bangsa yang menganut sistem demokrasi dalam sejarah panjangnya, khususnya paska kemerdekaan telah melewati tiga masa kepemimpinan, yaitu masa orde lama, Orde Baru, dan reformasi. Dari ketiga masa kepemimpinan itu tercatat telah melakukan sedikitnya sebelas kali pemilu. Kenyataan ini menunjukkan kalau bangsa Indonesia dalam konteks ini telah mengalami beberapa kali “masa percobaan” demokrasi yang

mengantarkan bangsa ini ke tengah-tengah kehidupan politik yang demokratis.

Proses berdemokrasi yang panjang ini telah menjadi perhatian para ahli, baik lokal ataupun internasional, terutama yang mempertanyakan relevansi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, baik sistem ataupun teknis pelaksanaannya di Indonesia. Contoh yang paling tepat dikemukakan dalam konteks berdemokrasi ini adalah pelaksanaan pemilu sebab pemilu bagian dari kehidupan politik bangsa, bagaimana semua masyarakat diberi kebebasan dalam menyampaikan aspirasi politiknya, khususnya dalam memilih dan dipilih menjadi pemimpin bangsa.

Jalan panjang pemilu ini sebagaimana yang disebutkan di awal tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat Islam sebagai komunitas yang terbesar di negeri ini, sebagai subjek sekaligus objek pemilih, karena peran serta masyarakat Islam memang sangat menentukan dalam proses demokrasi dalam pelaksanaan pemilu. Bahkan, tidak keliru untuk menyatakan bahwa pemilu tidak akan pernah berlangsung apabila tidak ada keterlibatan dan kesediaan masyarakat Islam untuk memberikan hak pilihnya. Untuk itulah, partisipasi masyarakat Islam dalam proses menyukseskan demokrasi dalam konteks pemilu tidak dapat diabaikan sebab masyarakat Islam telah membuktikan kiprahnya dalam mewarnai politik yang ada di negeri ini.

Oleh sebab itu, partisipasi politik masyarakat Islam itu menjadi penting dalam proses pemilu, setidaknya dapat ditandai dari keterlibatan individu atau kelompok dalam berbagai tingkatan di dalam sistem politik yang sedang berlangsung. Keterlibatan ini dapat diidentifikasi pada dua

bentuk, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif dapat dicirikan dengan, meminjam istilah Michael Rush, sikap masyarakat yang selalu disibukkan dengan diskusi politik informal oleh individu-individu, baik itu di lingkungan keluarga, tempat bekerja, atau segala tempat yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan. Sedangkan partisipasi pasif adalah kelompok masyarakat yang sangat sedikit membicarakan diskursus politik, tetapi tetap saja memiliki minat terhadap perkembangan politik.

Penelitian dalam disertasi ini menyorot tentang keterlibatan masyarakat Islam dalam demokrasi Indonesia, khususnya masyarakat Islam di pedesaan Sumatera menyangkut keterlibatan mereka dalam pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014. Secara umum berusaha menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan umum. Salah satu masyarakat Islam di kabupaten Kampar Propinsi Riau, yaitu masyarakat kelurahan Air Tiris, sebagai masyarakat yang diteliti.

Beberapa penelitian sebelumnya yang perlu penulis paparkan, pertama, penelitian Affan Gaffar mengenai perilaku memilih masyarakat pedesaan Jawa yang ditulis dalam buku berjudul *Javanese Voters : A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*⁷. Salah satu temuan dalam penelitian ini adalah alasan memilih dalam pemilihan umum dari masyarakatr desa Brobanti, Yogyakarta, adalah sebagai berikut.

Among the PDI voters, they did not seem to have a clear ideological reasoning. About 32 percent of the respondents who reported voting for the PDI said that they

⁷Afan Gaffar, *Javanese Voters A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 191-193.

voted because they just did not like both the PPP and Golkar. Hence, there is a tendency among PDI voters to vote against the established government and the Islamic party. "I do not like the PPP because they are very fanatic. The santri always condemn other people for not being good Moslems. I do not like Golkar either because Golkar people overact when they campaign," one young person stated in the interview.

The second reason they voted for the PDI is peer pressure, that is, other people doing the same thing. Third, the legacy of Sukarno is still popular for some PDI voters. Those who recall the glory days of the soekarno era tend to identify PDI with Sukarno. Hence, from them PDI is the legacy of Sukarno. About one-fifth of the PDI supporters showed this tendency. About 13% also said that the PDI represent the interest of the poor.

The primary reason why the respondent voted for Golkar is that it bears the image of government party. The Brobanti sample data indicated that almost 40% of the respondent said they voted for Golkar because they followed the path of their leaders (lurah, kepala dukuh, etc.) . They wanted to be identified with their leaders. The role of kepala dukuh is very strong in mobilizing the masses because about 22% of Golkar voters said that they voted Golkar because they were asked to do so. Golkar also has an advantage of being associated with the sultan of Yogyakarta, and his oldest son is also chairman for Golkar in Yogyakarta. During campaigns, village officials skillfully utilized this connections, and about 18% of the respondents who voted for Golkar said they like Golkar because it is the party of their Sultan. This is the second reason why they voted Golkar. The third reason is the ability of the government to convince villagers that Golkar promoted

development not politics. The good performance of the government to develop facilities (bridge, roads, dams, clinics, markets, and the like) seemed to impress the voters in rural areas that made them vote for Golkar, while the “negative vote” only contributed 6% of the respondents.

The followers of Islamic party (PPP) seem to be the most ideological among the respondents. Almost 33% of the respondent who voted for PPP revealed that as a Muslim it is imperative to vote for an Islamic party, since it is the defender of the Islamic cause. To be a good Muslim is to embrace Islam completely including to vote for an Islamic party. About one-third of the PPP voters also revealed that they voted for the party because their leaders asked them to do so. The Islamic leaders were able to convince their followers that voting for an Islamic party is part of worship or Ibadah and therefore it is also imperative to support PPP.

To Follow family tradition is another reason why the voters of the PPP in Brobanti voted for the party. About 22% of the respondent gave this kind of reason. Their parents came from a very devoted santri Muslim group that traditionally voted for Islamic parties, from Masyumi to Parmusi to PPP, or from NU to NU again and then to PPP.

(Di antara pemilih PDI, mereka tidak nampak memiliki alasan ideologis yang jelas. Sekitar 32 persen dari responden yang dilaporkan memilih PDI mengatakan bahwa mereka memilih karena mereka tidak menyukai PPP dan Golkar. Artinya, terdapat kecenderungan di antara pemilih PDI untuk tidak memilih partai pemerintah dan partai Islam. “Saya tidak memilih PPP karena mereka terlalu fanatik. Santri selalu melihat bahwa orang lain sebagai muslim yang tidak sungguh-sungguh. Saya tidak juga memilih Golkar karena pemilih Golkar terlalu

berlebihan dalam kampanye”, seorang pemuda menyatyakan dalam wawancara.

Alasan kedua mereka memilih PDI adalah lebih pada adanya perasaan senasib, yaitu, kesetaraan dan persamaan di antara mereka. Ketiga, kewibawaan Sukarno masih populer di kalangan pemilih PDI. Hal itulah yang menjadikan masa kejayaan era Sukarno cenderung menjadikan PDI identik dengan Sukarno. Oleh karena itu, dari merekalah PDI adalah pengejawantahan ide-ide Sukarno. Sekitar seperlima dari pemilih PDI juga menyatakan bahwa PDI adalah representasi dari kaum miskin, wong cilik.

Alasan penting mengapa responden memilih Golkar adalah bahwa Golkar merupakan partai pemerintah. Sampel data dari Brobanti menandakan bahwa hampir 40 persen responden mengatakan mereka memilih Golkar karena mereka mengikuti langkah pemimpin-pemimpin mereka (lurah, kepala dukuh, dsb.). Mereka ingin mengidentifikasi diri dengan pemimpin mereka. Peranan kepala dukuh sangat kuat dalam memobilisasi masa karena sekitar 22 persen pemilih Golkar mengatakan bahwa mereka memilih Golkar karena mereka diperintahkan untuk itu. Golkar juga memiliki keuntungan dari hubungannya dengan sultan di Yogyakarta, dan anak laki-laki tertuanya juga pemimpin Golkar di Yogyakarta. Selama dalam masa kampanye, para kepala desa dengan trampil menggunakan hubungan-hubungan ini, dan sekitar 18 persen dari responden yang memilih Golkar mengatakan mereka memilih Golkar karena Golkar adalah partainya Sultan. Hal ini merupakan alasan kedua mengapa mereka memilih Golkar. Alasan ketiga adalah kemampuan pemerintah menegaskan kepada para kepala desa bahwa Golkar adalah membangun bukan berpolitik.

Kebijakan-kebijakan nyata pemerintah dalam membangun fasilitas infrastruktur (jembatan, jalan, bendungan, klinik, pasar, dan lain-lain) nampak berhasil menarik para pemilih desa untuk memilih Golkar, sementara yang tidak memilih Golkar hanya 6 persen dari responden.

Pengikut partai Islam PPP nampak paling ideologis di antara para responden. Hampir 33 persen responden yang memilih PPP menegaskan bahwa seorang Muslim harus memilih partai Islam, karena hal ini merupakan perilaku mempertahankan ke-Islama-annya. Menjadi Muslim yang sungguh-sungguh adalah menjalankan Islam secara menyeluruh termasuk memilih partai Islam. Sekitar sepertiga dari pemilih PPP juga menegaskan bahwa mereka memilih suatu partai karena para pemimpin mereka memerintahkan. Para pemimpin Islam memiliki kemampuan untuk menjelaskan kepada pengikut mereka bahwa memilih partai Islam merupakan bagian dari ibadah dan oleh karena itu juga termasuk mendukung partai Islam, PPP.

Mengikuti tradisi keluarga adalah alasan yang lainnya mengapa pemilih PPP di Brobanti memilih partai politik. Sekitar 22 persen responden memberikan alasan seperti ini. Orang tua mereka berasal dari kelompok muslim santri yang sangat taat yang secara tradisional memilih partai-partai Islam, dari Masyumi ke Parmusi ke PPP, atau dari NU ke NU lagi dan kemudian ke PPP).

Penelitian ini lebih menegaskan penemuannya bahwa masyarakat santri menjatuhkan pilihannya pada partai-partai Islam sementara masyarakat abangan menjatuhkan pilihannya pada partai-partai nasionalis. Sementara penelitian di pedesaan Riau kecenderungan menjatuhkan pilihan seperti tersebut di atas telah memudar. Semula masyarakat santri memang

menjatuhkan pilihannya ke partai Islam, dari Masyumi, NU, Parmusi sampai Partai Persatuan Pembangunan. Namun dalam perkembangannya pertimbangan memilih mereka lebih ditentukan oleh isu-isu kontemporer, perubahan sistem pemilihan umum dan ketokohan, lebih menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pilihan pada pemilihan umum.

Kedua, Sejak pemilu demokratis pertama yang dilaksanakan tahun 1955 para ilmuwan menganggap bahwa politik aliran tetap menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku politik pemilih, dan berlangsung sampai pada pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 di bawah rezim represif Orde Baru. Melangkah ke paruh ketiga politik Indonesia (Orde Reformasi) kekuatan politik aliran masih dianggap punya pengaruh terhadap perilaku politik di Indonesia, namun sudah mulai terjadi polemik antara mereka yang mendukung dan yang membantah.

Kutub yang tetap mendukung politik aliran direpresentasikan Dwight King, dalam bukunya, *“Half-Hearted Reform, Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia”*, dan Anis Baswedan, dalam tulisannya yang berjudul “Sirkulasi Suara Dalam Pemilu 2004”. Sementara kutub yang berlawanan direpresentasikan William Liddle dan Saiful Mujani dalam karyanya *“Leadership, Party and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia”*. King menyajikan sebuah diskusi yang menarik, dengan menggunakan analisis statistik berupa teknik analisis bivariate dan multiple regression untuk membandingkan hasil pemilu 1955 dan pemilu 1999. Data yang digunakan adalah data agregat nasional hasil pemilu, dan data geografis yang diuji dengan indikator-indikator seperti urbanisasi, aktivitas pemerintah, keislaman, angka melek huruf, faktor ketidak merataan

(*inequality*), dan program pembangunan. Kesimpulan yang dihasilkan adalah “adanya keberlanjutan politik aliran seperti fenomena pemilu 1955 Orde Lama ke pemilu 1999 Orde Reformasi.” Begitu juga dengan Baswedan, dengan mengadopsi metodenya King berusaha membandingkan pola dukungan pemilih pada pemilu 1999 dan 2004. Baswedan menemukan adanya korelasi signifikan antara dukungan untuk partai Islam di setiap Kota dan Kabupaten selama dua pemilu. Secara sama, partai Nasionalis dan Kristen mendapat dukungan kuat di daerah-daerah yang merupakan basis dukungan PDI-P. Kesimpulan yang dikemukakan adalah “pada tingkat masyarakat masih ditemukan pola politik berbasis aliran, perubahan politik lintas aliran tidak ditemukan dalam pemilu 2004.”

Hasil yang berbeda dengan apa yang ditemukan King dan Baswedan, Liddle dan Mujani justru menemukan bahwa pengaruh orientasi keberagamaan atau aliran (pelaksanaan keberagamaan seorang muslim), pada suara hasil pemilu tahun 1999 dan 2004 sangat terbatas. Justru Liddle dan Mujani menemukan bahwa faktor kepemimpinan menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi perilaku politik pemilih. Hal ini dijelaskan oleh Liddle dan Mujani sebagai dampak dari berkembangnya media massa khususnya televisi sampai ke pelosok-pelosok daerah. Temuan ini berusaha mematahkan pandangan umum yang selama ini berkembang dalam mengkaji Indonesia dari mulai Geertz 1950-an sampai dengan King dan Baswedan. Apakah temuan Liddle dan Mujani ini akan menjadi sebuah paradigma baru dalam menjelaskan perilaku politik Indonesia, akan sangat bergantung pada seberapa besar dukungan dari masyarakat, khususnya masyarakat akademis sebagaimana yang dikemukakan Khun.

Dalam kaitan partisipasi politik ini, secara lebih terperinci Dan Nimmo memberikan empat karakteristik partisipasi politik, yaitu 1) adanya sikap untuk mengidentifikasi partai politik; 2) melakukan pendaftaran untuk ikut pemilihan; 3) memberikan suara dalam Pemilu; dan 4) keikutsertaan dalam bagian kampanye yang diselenggarakan oleh partai politik. Identifikasi yang diajukan Nimmo ini memang dilihatnya dalam konteks negara Amerika, tetapi juga sangat relevan dengan konteks politik yang telah atau sedang berlangsung di Indonesia sebab kecenderungan yang disebutkan Nimmo itu telah dibuktikan dengan antusiasnya masyarakat Indonesia dalam mensukseskan “pesta demokrasi” ini, baik itu diskusi kelompok hingga keterlibatan mereka di dalam salah satu partai politik.

Berkaitan dengan hal di atas, pada tahun 2009 Indonesia melaksanakan Pemilu legislative, termasuk DPD, dan Pemilu Presiden yang telah diatur melalui UU Pemilu No. 10 Tahun 2008. Khususnya Pemilu legislatif, rakyat Indonesia diharuskan memilih di antara 38 Partai dan dihadapkan pada sebuah sistem baru yang belum pernah sama sekali dikenal, yaitu Sistem Proporsional Terbuka. Sistem ini mengatur setiap Calon Legislatif akan terpilih apabila mampu mengumpulkan suara terbanyak.

Oleh sebab itu, sistem tersebut bagi calon legislatif merupakan “angin surga” yang berimplikasi pada persamaan kesempatan. Kenyataan yang demikian tentu akan dimanfaatkan oleh para calon legislatif untuk mensosialisasikan diri dalam upaya merebut simpati masyarakat dengan berbagai cara agar menjadi pilihan rakyat termasuk melayani permintaan masyarakat yang cenderung pragmatis.

Kenyataan tersebut melahirkan sikap pesimisme bagi sebagian masyarakat Islam bahwa praktek politik seperti ini tidak lebih dari sekedar melampiaskan ambisi politik sebagian kalangan elit yang berlindung di balik baju demokrasi. Sikap pesimis ini tentu membawa pergeseran partisipasi politik masyarakat yang mungkin sekali disebabkan adanya semacam “trauma” politik ketika rezim Orde Baru berkuasa, yang telah melakukan “pemaksaan” politik menjadikan sebagian masyarakat Islam tidak lagi begitu percaya dengan sistem pemilu yang dilaksanakan. Pemaksaan politik ini memberi implikasi dengan munculnya gerakan Golput (golongan putih); atau golongan yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pemilu (netral) di tengah masyarakat yang semakin menguat khususnya paska reformasi.

Menguatnya angka golput pada masa reformasi nampaknya sangat berkaitan erat dengan semangat yang dibawa reformasi tersebut, yang telah mengilhami munculnya kebebasan tanpa batas, paling tidak ini menurut sebagian ahli, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan memenuhi hak dan kewajiban, hingga kebebasan mendirikan partai politik dan lainnya.

Tingginya angka golput memiliki hubungan langsung dengan perilaku politik masyarakat Islam yang berlangsung selama ini, menurut Tolkhah bahwa perilaku masyarakat dalam pemilu seiring munculnya sikap golput juga diikuti tarik menarik antara kalangan, meminjam istilah Clifford Geertz, santri (partai Islam) dan abangan (partai nasionalis) dalam upaya menyampaikan aspirasi politiknya, dan kedua partai yang berbeda ini jelas tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat Islam di dalamnya.

Perilaku politik ini terus mengalami perkembangan pada fase selanjutnya, yaitu pergeseran dari perilaku politik

yang bercorak kultural (*cultural oriented*) dengan fokus gerakan pada pembelaan dan pemberdayaan masyarakat hingga pada perilaku politik yang bercorak struktural (*structural oriented*), bahkan perkembangan terakhir menunjukkan pergeseran itu terus mengalami perkembangan pada puncak yang mengkhawatirkan pada perilaku politik yang bercorak pragmatis (*pragmatical oriented*).

Perilaku politik pragmatis yang dimaksud di sini, juga tidak terlepas dari masyarakat Islam di dalamnya, adalah bahwa ada kenyataan yang sudah menjadi “rahasia umum” bahwa tipologi politik yang muncul berkaitan dengan kecenderungan “*political money*” di tengah-tengah masyarakat semakin menjadi nyata. Kenyataan ini dapat dilihat pada proses tahapan pemilu, seperti sosialisasi, kampanye, pemilihan dan paska pemilihan dengan pandangan politik masyarakat bahwa siapa yang memiliki atau yang memberi uang akan mendapat dukungan dari masyarakat tanpa mempertimbangkan kapabilitas calon yang didukung.

Berkaitan dengan perilaku politik pragmatis ini sebenarnya memberi dampak yang kurang baik dalam proses berdemokrasi di Indonesia sebab beberapa kasus yang mengemuka berawal dari sudut pandang yang pragmatis ini. Umpamanya, dalam konteks pemilihan Kepala Daerah di beberapa daerah, sering diiringi dengan munculnya beberapa konflik, bahkan cenderung pada perilaku anarkisme di kalangan simpatisan partai, seperti pengrusakan gambar, baliho, spanduk, dan lainnya. Tentu saja fenomena konflik dan anarkisme ini menunjukkan belum “dewasanya” masyarakat partai dan masyarakat awam dalam proses berdemokrasi, yang juga sangat

berkaitan langsung dengan perilaku politik pragmatis masyarakat tersebut.

Ketiga, sejalan dengan perkembangan waktu ditemukan pegeseran pemikiran politik Islam di Indonesia di era paska Orde Baru. Dalam penelitiannya yang berjudul “Polarisasi Pemikiran Politik Islam di Indonesia Paska Orde Baru: Studi terhadap Pemikiran Politik Partai-partai Islam”, Sri Wahyuni dan Udiyo Basuki⁸ menemukan bahwa pada masa Orde Baru, pemikiran politik Islam lebih didominasi oleh pemikiran legal formal atau formalistik yang diindikasikan dengan semangat kepartaian yang berasaskan Islam dengan pelabelan simbol-simbol keislaman, bahkan memperjuangkan Islam ideologis.

Sedangkan pada masa akhir Orde Baru, pemikiran politik Islam di Indonesia didominasi oleh pemikiran substansial atau substantifistik. Kemudian, pada era paska Orde Baru terjadi transformasi pemikiran politik Islam dari dominasi substantifistik menjadi munculnya kembali pemikiran formalistik. Namun, kedua tipologi tersebut muncul bersamaan dan tidak bisa dikatakan bahwa salah satu di antara keduanya menjadi dominan.

Keempat, gagasan-gagasan pemikiran dari berbagai corak pemikiran, yang disebutkan oleh para ahli di atas, secara signifikan mempengaruhi perilaku politik pemiliknya. Sebagai contoh, Abdul Haris⁹ menemukan dalam penelitiannya tentang pergeseran perilaku politik NU di Jember, Jawa Timur, menyebutkan bahwa telah terjadi pergeseran perilaku politik di kalangan NU dari yang bercorak kultural (*cultural oriented*) ke struktural (*structural*

⁸<http://ramadhansyariah.wordpress.com/pemikiran/pandangan-dan-perilaku-politik-masyarakat-muslim-pinggiran-kota-medan-pada-pemilu-2009/>.

⁹*Ibid.*

oriented). Pergeseran ini secara personal bukan institusional tetapi juga tetap memberi pengaruh yang besar terhadap perilaku politik komunitas NU di Indonesia secara global sebab organisasi keagamaan seperti NU memiliki masa yang menyebar ke seluruh Indonesia maka dapat dipastikan bahwa perilaku politik dalam kaitan sentimen organisasi keagamaan tetaplah menjadi relevan dalam pemilu 2009, dan pemilu-pemilu ke depan.

Kelima, berkaitan dengan penelitian Haris di atas, Muslih¹⁰, dalam penelitiannya tentang perilaku politik masyarakat di Surakarta, menemukan bahwa gagasan-gagasan negara syari'ah, gagasan pemberlakuan syari'at Islam secara *kâffah*, dan berhubungan dengan persoalan kenegaraan, yaitu institusi negara, konstitusi negara, dasar negara, sistem pemerintahan, demokrasi, pemilu, dan peranan politik perempuan telah memberikan pengaruh besar terhadap perilaku politik yang mereka lakukan dalam ranah praksis-pragmatis.

Lebih jauh, Muslih menyatakan perilaku penganut paham ini cenderung memiliki pola yang sama dengan pola gagasan-gagasan yang dipegangi, yaitu kebanyakan moderat dalam perilaku. Didasari oleh faktor sejarah, sosial, budaya lingkungan yang melingkupi organisasi dan para tokohnya, kelompok pendukung gagasan negara syari'ah di Surakarta ini, walaupun secara pemahaman teologis fundamental, dalam praktiknya telah mengalami adaptasi dan akulturasi sehingga cenderung moderat. Jadi, pelabelan terhadap kelompok ini sebagai kelompok beraliran radikal, untuk kasus Surakarta belum masuk kategori sebagai gerakan (perilaku) yang benar-benar radikal.

¹⁰*Ibid.*

Keenam, berkaitan dengan penelitian di atas ada suatu penelitian lagi yang telah memetakan perilaku politik masyarakat Islam, khususnya di Sumut yang sangat dekat dengan penelitian ini, yaitu penelitian Abbas Pulungan¹¹ tentang isu agama dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Pulungan menyimpulkan bahwa pemikiran dan aksi agama atau afiliasi kelompok-kelompok keagamaan telah menciptakan suasana hubungan sosial yang kondusif. Hal ini bermakna bahwa kegiatan pilkada di tengah masyarakat yang heterogen dari sisi agama dan etnis tidak selamanya meningkatkan intensitas konflik, tetapi juga mengurangi konflik itu.

Dengan demikian, setidaknya terlihat jelas bahwa ragam pemikiran politik, wilayah, kondisi sosial budaya, dan terlebih lagi agama sangat mempengaruhi perilaku politik masyarakat sebab apa yang disebutkan ragam terakhir ini memang memiliki daya pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk perilaku politik masyarakat yang memang terkenal sangat menjunjung tinggi nilai agamanya.

Ketujuh, R. William Liddle dan Saiful Mujani¹², dalam tulisannya berjudul *"The Real Face of Indonesian Islam"* yang diterbitkan oleh The Newyork Times pada 11 Oktober 2003 mengemukakan bahwa tidak lebih dari 15 % muslim Indonesia menginginkan negara Islam, 85 % moderat dan menolak negara Islam. Islam sebagai ideologi politik telah hilang dari bumi Indonesia. Lebih lanjut dikemukakan bahwa penyebab menurunnya dukungan muslim terhadap negara Islam adalah adanya perubahan hati (*change of heart*) dari para pemimpin NU dan Muhammadiyah. Temuan ini, walaupun terkesan ekstrim, namun

¹¹ *Ibid.*

¹² www.nytimes.com/2003/10/11/opinion/the-real-face-of-indonesian-islam.html

memberikan kesan yang lebih kuat terhadap kecenderungan lebih pragmatis masyarakat muslim dalam memilih pada pemilihan umum.

Kedelapan, Ramadhan Syariah¹³ dalam penelitiannya yang berjudul “Pemikiran, Pandangan dan Perilaku Politik Masyarakat Muslim Pinggiran Koita Medan pada Pemilu 2009” menemukan kesimpulan yang cenderung menunjukkan pragmatisme perilaku politik masyarakat muslim lebih dominan dibandingkan motif ideologi. Penelitian ini melihat adanya relevansi kajian tentang perilaku politik masyarakat muslim pada pemilu 2009 di Pinggiran Kota Medan. Perilaku politik masyarakat muslim ini sangat menentukan proses pelaksanaan pemilu karena posisi masyarakat muslim sebagai penentu berlangsung atau tidaknya pemilu yang digelar dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden.

Secara ringkas, pandangan dan perilaku politik masyarakat muslim pinggiran kota Medan pada pemilu 2009 paling tidak ditemukan ada lima pandangan dan perilaku politik, yaitu 1) pandangan dan perilaku politik uang; 2) pandangan dan perilaku politik aliran plus uang; 3) perilaku politik perjuangan ideologi; 4) pandangan dan perilaku apatis politik; dan 5) pandangan dan perilaku politik hiburan.

Kesembilan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Simalungun Sumatera Utara melakukan penelitian tentang perilaku memilih masyarakat di kabupaten Simalungun pada pemilihan umum tahun 2014. Pada pemilihan umum legislatif 2014 di kabupaten Simalungun, masyarakat Simalungun telah menggeser kekuasaan Partai Golkar dan bergeser ke Partai Demokrat.

¹³*Opcit.*

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menunjukkan terjadinya peralihan memilih masyarakat Simalungun dari sebelumnya mereka memenangkan Partai Golkar beralih memenangkan Partai Demokrat. Perubahan orientasi politik masyarakat Simalungun ini disebabkan oleh orientasi rasional masyarakat berdasarkan sistem nilai, etika, moralitas dan agama.¹⁴

Kesepuluh, penelitian yang berjudul “*Money Politics* dan Implikasinya terhadap Partisipasi Masyarakat Kabupaten Cirebon pada Pemilu Legislatif 2014” menunjukkan suatu fenomena maraknya politik uang di kabupaten Cirebon pada pemilu legislatif 2014. Kemenangan para calon legislator cenderung ditentukan oleh faktor uang, termasuk dalam bentuk barang, seperti sembako dan lain-lain.

Maraknya praktek *money politics* di kabupaten Cirebon pada pemilu legislatif 2014 tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; pertama sistem Pemilu *proportional representation* dengan varian daftar terbuka (*open list*), kedua, rendahnya tingkat pendidikan “politik” dan ketiga, faktor kemiskinan, kelemahan ekonomi.¹⁵

Kesebelas, Muhamad Ramli, dalam penelitiannya yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Desa Kadundung Kecamatan Labuan Amas Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Tahun 2010”. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku politik masyarakat desa Kadundung dalam pemilihan bupati langsung tahun 2010

¹⁴Komisi Pemilihan Umum kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, 2014.

¹⁵Ahmad Jamhuri, *Money Politics* dan Implikasinya terhadap Partisipasi Masyarakat Kabupaten Cirebon pada Pemilu Legislatif 2014, KPU kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 2014.

dipengaruhi oleh faktor popularitas calon, status sosial ekonomi dan kondisi sosial politik.¹⁶

Keduabelas, Rizky Hani, S.P dalam penelitiannya yang berjudul “Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilukada Tahun 2009 (Studi Kasus Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang)” menemukan fenomena yang menunjukkan bahwa partisipasi politik etnis Tionghoa dalam pemilukada tahun 2009 di desa Kragan kecamatan Kragan kabupaten Rembang adalah tergolong pasif dan kecenderungan peran mereka dalam pemilukada hanya ikut memilih dan sebagian ikut menjadi pihak sponsor dalam kampanye. Terdapat beberapa motif mereka melakukan partisipasi dan perubahan sosial kehidupan mereka terutama dalam aspek mobilitas sosial.¹⁷

Ketigabelas, Sarus, SP, sebagai ketua tim peneliti Riset Partisipasi Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015, melakukan penelitian dalam judul “Tingkat Kehadiran Pemilih dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih untuk Hadir Memilih pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Muna”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pada pemilu

¹⁶Muhamad Ramli, “Partisipasi Politik Masyarakat Desa Kadundung Kecamatan Labuan Amas Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Tahun 2010” dalam Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.

¹⁷Rizky Hani, S.P, “Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilukada Tahun 2009 (Studi Kasus Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang)”, dalam Jurnal Paradigma, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2013, Fakultas Ilmu Spsial Universitas Negeri Surabaya.

legislatif tahun 2014 di kabupaten Muna tergolong rendah, tingkat kehadiran pemilih hanya 62,48%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih pada pemilu legislatif 2014 di kabupaten Muna meliputi empat Faktor. Pertama, faktor geografis seperti cuaca, jarak; kedua, faktor sosial ekonomi; ketiga, faktor psikologis; dan keempat, faktor rasional.¹⁸

Keempatbelas, Yanto Supriyatno melakukan penelitian pada pemilih pemula mahasiswa Universitas Islam “45” tahun angkatan 2014/2015, tentang partisipasi politik pemilih pemula dengan judul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 (Survei pada Mahasiswa Universitas Islam “45” Tahun Angkatan 2014/2015)”. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi perilaku memilih pemilih pemula saat pemilu legislatif tahun 2014.

Beberapa faktor tersebut antara lain pertama, keinginan besar untuk merasakan pengalaman menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih yang pertama merupakan pengalaman yang luar biasa bagi para pemilih pemula. Faktor kedua, adalah faktor yang mempengaruhi pilihan mereka, antara lain adalah faktor kampanye visual seperti iklan tv/radio, poster, spanduk, dan baliho; dan penelaahan perhatian mereka terhadap visi, misi dan program yang ditawarkan oleh kandidat legislatif.¹⁹

¹⁸Sarus, SP, Ketua Tim Peneliti, “Tingkat Kehadiran Pemilih dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih untuk Hadir Memilih pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Muna”, Penelitian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015.

¹⁹Yanto Supriyatno, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 (Survei pada Mahasiswa Universitas

Kelimabelas, Diah Setiawaty, dalam penelitian yang berjudul “Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik yang Programatik”, melihat satu fenomena di mana tingkat partisipasi politik di Indonesia semakin menurun. Pada pemilu 1999 tingkat partisipasi politik masyarakat 93%, pada pemilu 2004 tingkat partisipasinya 84%, dan pada pemilu tahun 2009 tingkat partisipasi politiknya 71%.

Mengatasi masalah trend penurunan tingkat partisipasi politik ini diperlukan program pendidikan pemilih yang sistematis, terstruktur dan masif dengan ditunjang oleh adanya informasi pemilih yang intensif menjelang pemilihan umum.²⁰

Keenambelas, RR Emilia dan Wawan Ichwanuddin melakukan penelitian tentang partisipasi politik dan perilaku memilih, dengan judul “Partisipasi politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014”. Penelitian ini menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dan perilaku memilih pada pemilu 2014. Faktor-faktor pengaruh tersebut yaitu faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor pilihan rasional.

Faktor sosiologis meliputi; pertama, dalam diri pemilih, ketaatan seseorang dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya tidak selalu memberikan pengaruh pada pilihan partai politiknya. Namun demikian, ketika pemilih dihadapkan pada pilihan calon legislatif dalam pemilu latar belakang agama caleg memberi pengaruh terhadap pilihan calegnya, dan cenderung memilih caleg yang seagama dengannya.

Islam “45” Tahun Angkatan 2014/2015)”, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Kybernan Volume7, Nomor 1, Maret 2016.

²⁰Diah Setiawaty, “Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik yang Programatik” dalam Jurnal Islamic Review, JIE Volume III No. 1 April 2014M./Jumadi al-Akhirah 1435H.

Kedua, adanya janji-janji pemberian bantuan materi memang tidak banyak mempengaruhi para pemilih dalam menentukan pilihannya. Namun demikian, bagi pemilih yang telah berusia lanjut, tinggal di pedesaan, dan berpendidikan rendah, maka janji-janji pemberian bantuan materi tersebut merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam memberikan suaranya. Ketiga, dalam menentukan pilihan politiknya, para pemilih pemula sering terpengaruh oleh pilihan orang-orang di sekitarnya seperti keluarga dan teman sekelompoknya. Para pemilih pemula ini, khususnya yang tinggal di pedesaan, mayoritas mengikuti sikap orang tuanya atau tokoh yang dihormati di lingkungannya.

Faktor psikologis memperlihatkan beberapa hal; pertama, diskusi politik di lingkungan keluarga, media terutama televisi. Kedua, loyalitas yang rendah terhadap partai politik serta tidak adanya identitas kepartaian pada seseorang membuat orang mudah pindah pilihan partai politik. Memunculkan jarak ideologis antara pemilih dan partai politik. Faktor rasional/ekonomi memperlihatkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan isu yang strategis bagi mayoritas pemilih. Pemenuhan kebutuhan ekonomi berkembang menjadi kompetisi antar caleg.²¹ Juga antar partai politik untuk membangun kedekatan dengan pemilihnya.

Ketujuhbelas, Putut Setyadhi, SE, KPU Kota Jakarta Selatan melaksanakan penelitian, "Perilaku Memilih (*Voting Behavior*) Pemilu Tahun 2014 di Kota Administrasi Jakarta Selatan". Penelitian ini menemukan sejumlah poin kesimpulan yang menggambarkan kecenderungan perilaku

²¹RR Emilia dan Wawan Ichwanuddin, "Partisipasi politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014", dalam Jurnal Penelitian Politik, Volume 12 No. 1, Juni 2015, hal. 117-135.

memilih di DKI Jakarta, dan khususnya di kota Jakarta Selatan.

Pertama, umumnya pemilih di Jakarta Selatan lebih banyak yang memberikan suara pada caleg daripada untuk partai politik. Masyarakat pemilih lebih mudah menagih janji ke caleg daripada ke partai politik. Kedua, temuan data hasil perolehan suara di Jakarta Selatan menunjukkan bahwa dukungan suara untuk caleg laki-laki lebih banyak daripada untuk caleg perempuan. Ketiga, partisipasi pemilih perempuan di Jakarta Selatan ternyata lebih tinggi daripada pemilih laki-laki. Gambaran partisipasi pemilih di Jakarta Selatan tersebut menunjukkan bahwa akses perempuan dalam kegiatan pemilu relatif tidak ada persoalan.²²

Kedelapanbelas, Sakir, Suranto, Awang Darumurti, Tunjung Sulaksono, meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilihan umum tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014, dalam penelitian yang berjudul "Pemetaan Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul". Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang menentukan tingginya partisipasi masyarakat di kabupaten Bantul adalah a) afiliasi politik dengan orang terdekat; b) adanya stimulus partisipasi; c) adanya kontrol sosial yang ketat, sehingga perilaku tidak menggunakan hak pilih akan dianggap "ora umum"; d) pragmatisme politik masyarakat yang terkoordinasi oleh lembaga RT/Dukuh terjadi untuk

²²Putut Setyadhi, SE, KPU Kota Jakarta Selatan, "Perilaku Memilih (*Voting Behavior*) Pemilu Tahun 2014 di Kota Administrasi Jakarta Selatan", Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan, Tahun 2015

mobilisasi pemilih; dan e) adanya kepedulian kelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.²³

Temuan-temuan penelitian di atas lebih menegaskan penemuannya bahwa pada masa awal kehidupan demokrasi di Indonesia sampai dengan masa Orde Baru, pengaruh ideologi atau aliran cukup signifikan mempengaruhi perilaku memilih masyarakat, terutama masyarakat desa. Dalam hal ini, masyarakat santri menjatuhkan pilihannya pada partai-partai Islam sementara masyarakat abangan menjatuhkan pilihannya pada partai-partai nasionalis. Pada perkembangannya, terutama setelah berakhirnya Orde Baru dan memasuki era reformasi, pengaruh ideologi atau aliran ini mulai memudar mempengaruhi perilaku memilih masyarakat, terutama masyarakat desa, dan lebih mengarah pada perilaku yang lebih pragmatis.

Sementara penelitian di pedesaan Riau kecenderungan menjatuhkan pilihan berdasarkan aliran ideologi seperti tersebut di atas juga telah memudar. Semula masyarakat santri memang menjatuhkan pilihannya ke partai Islam, dari Masyumi, NU, Parmusi sampai Partai Persatuan Pembangunan. Namun dalam perkembangannya pertimbangan memilih mereka lebih ditentukan oleh isu-isu kontemporer, perubahan sistem pemilihan umum dan ketokohan, lebih menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pilihan pada pemilihan umum. Kondisi seperti ini, paling tidak, ditemukan pada masyarakat Air Tiris, kecamatan Kampar, kabupaten Kampar, provinsi Riau.

Temuan dari beberapa penelitian tentang perilaku politik masyarakat Islam tersebut menunjukkan alur atau

²³Sakir, Suranto, Awang Darumurti, Tunjung Sulaksono, "Pemetaan Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul",

kecenderungan fungsi ideologi Islam yang lebih mengarah pada semakin pragmatisnya para pemilih Islam, walaupun ideologi aliran masih tetap eksis. Hal tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel 1.3. berikut :

Tabel 1.3.
Temuan Penelitian dan Dampak Teoritik

Peneliti, Judul Penelitian	Temuan	Dampak Teoritik
Afan Gaffar Javanese Voters : A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System	<i>The followers of Islamic party (PPP) seem to be the most ideological. Almost. As a Muslim it is imperative to vote for an Islamic party, since it is the defender of the islamic cause. To be a good Muslim is to embrace Islam completely including to vote for an Islamic party. They voted for the party because their leaders asked them to do so. The Islamic leaders were able to convince their followers that voting for an Islamic party is part of worship or Ibadah and</i>	Temuan penelitian Afan Gaffar menunjukkan bahwa teori ideologi santri-abangan dari Clifford Geertz masih kuat pada pemilu Orde Baru.

	<p><i>therefore it is also imperative to support PPP.</i></p> <p><i>To Follow family tradition is another reason. Their parents came from a very devoted santri Muslim group that traditionally voted for Islamic parties, from Masyumi to Parmusi to PPP , or from NU to NU again and then to PPP.</i></p>	
<p>Dwight King <i>“Half-Hearted Reform, Electoral Institutions and the Struggle fo Democracy in Indonesia”</i>, dan Anis Baswedan <i>“Sirkulasi Suara Dalam Pemilu 2004”</i>.</p>	<p>Dwight King (2003), dalam bukunya, <i>“Half-Hearted Reform, Electoral Institutions and the Struggle fo Democracy in Indonesia”</i>, dan Anis Baswedan (2004), dalam tulisannya yang berjudul <i>“Sirkulasi Suara Dalam Pemilu 2004”</i>. Kesimpulan yang dihasilkan adalah <i>“adanya keberlanjutan politik aliran seperti fenomena pemilu 1955 Orde Lama ke pemilu 1999 Orde Reformasi.”</i> Begitu juga dengan</p>	<p>Temuan penelitian Dwight King dan Anis Baswedan menunjukkan bahwa teori ideologi santri-abangan dari Clifford Geertz masih kuat pada pemilu Orde Reformasi.</p>

	<p>Baswedan (2004), Baswedan menemukan adanya korelasi signifikan antara dukungan untuk partai Islam di setiap Kota dan Kabupaten selama dua pemilu. Secara sama, partai Nasionalis dan Kristen mendapat dukungan kuat di daerah daerah yang merupakan basis dukungan PDI-P. Kesimpulan yang dikemukakan adalah “pada tingkat masyarakat masih ditemukan pola politik berbasis aliran, perubahan politik lintas aliran tidak ditemukan dalam pemilu 2004.”</p>	
<p>R. William Liddle dan Syaiful Mujani “<i>Leadership, Party and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia</i>”.</p>	<p>William Liddle dan Saiful Mujani dalam karyanya “<i>Leadership, Party and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia</i>”. Liddle dan Mujani menemukan bahwa pengaruh orientasi keberagaman atau</p>	<p>Temuan penelitian R. William Liddle dan Syaiful Mujani menunjukkan bahwa teori ideologi santri-abangan dari Clifford Geertz</p>

	<p>aliran (pelaksanaan keberagaman seorang muslim), pada suara hasil pemilu tahun 1999 dan 2004 sangat terbatas. Liddle dan Mujani menemukan bahwa faktor kepemimpinan menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi perilaku politik pemilih. Hal ini dijelaskan oleh Liddle dan Mujani sebagai dampak dari berkembangnya media massa khususnya televisi sampai ke pelosok-pelosok daerah. Temuan ini berusaha mematahkan pandangan umum yang selama ini berkembang dalam mengkaji Indonesia dari mulai Geertz 1950-an sampai dengan King dan Baswedan.</p>	<p>sangat terbatas dan lebih pada pilihan yang pragmatis pada pemilu Orde Reformasi.</p>
<p>Sri Wahyuni dan Udiyo Basuki,</p>	<p>Pada masa Orde Baru, pemikiran politik Islam lebih didominasi oleh</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan adanya</p>

<p>Polarisasi Pemikiran Politik Islam di Indonesia Paska Orde Baru: Studi terhadap Pemikiran Politik Partai- partai Islam</p>	<p>pemikiran legal formal yang diindikasikan dengan semangat kepartaian yang berasaskan Islam. memperjuangkan Islam ideologis. Sedangkan pada masa akhir Orde Baru, pemikiran politik Islam di Indonesia didominasi oleh pemikiran substansial. Kemudian, pada era paska Orde Baru kembali muncul pemikiran formalistic, mendampingi pemikiran substansial. Dan, kedua tipologi tersebut muncul bersamaan dan tidak bisa dikatakan bahwa salah satu di antara keduanya menjadi dominan.</p>	<p>persaingan antara Islam ideologis dan Islam substansial. Walaupun pemikiran Islam ideologis masih mewarnai namun kelihatan semakin memudar.</p>
<p>Abdul Haris, Pergeseran Perilaku Politik NU di Jember, Jawa Timur</p>	<p>Telah terjadi pergeseran perilaku politik di kalangan NU dari yang bercorak kultural (<i>cultural oriented</i>) ke struktural</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan penguatan Islam ideologis</p>

	<p>(<i>structural oriented</i>) secara personal tetapi juga tetap memberi pengaruh besar terhadap perilaku politik komunitas NU di Indonesia secara global sebab organisasi keagamaan seperti NU memiliki masa yang menyebar ke seluruh Indonesia. Dapat dikatakan bahwa perilaku politik dalam kaitan sentimen organisasi keagamaan tetaplah menjadi relevan dalam pemilu 2009, dan pemilu-pemilu ke depan.</p>	<p>di kalangan masyarakat NU.</p>
<p>Muslih, Perilaku Politik Masyarakat di Surakarta</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa gagasan-gagasan negara syari'ah, gagasan pemberlakuan syari'at Islam secara kâffah, dan berhubungan dengan persoalan kenegaraan, telah</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan adanya keseimbangan antara Islam ideologis dan Islam substansial. Namun cenderung ke</p>

	<p>memberikan pengaruh besar terhadap perilaku politik yang mereka lakukan dalam ranah praksis-pragmatis.</p> <p>Lebih jauh, Muslih menyatakan perilaku penganut paham ini cenderung moderat dalam perilaku. Didasari oleh faktor sejarah, sosial, budaya lingkungan yang melingkupi organisasi dan para tokohnya, kelompok pendukung gagasan negara syari'ah di Surakarta ini, walaupun secara pemahaman teologis fundamental, dalam praktiknya telah mengalami adaptasi dan akulturasi sehingga cenderung moderat.</p>	<p>arah yang substansial pragmatis.</p>
<p>Abbas Pulungan, Isu Agama dalam</p>	<p>Pulungan menyimpulkan bahwa pemikiran dan aksi agama telah</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan adanya fungsi positif</p>

<p>Pemilihan Gubernur Sumatera Utara</p>	<p>menciptakan suasana hubungan sosial yang kondusif. Hal ini bermakna bahwa kegiatan pilkada di tengah masyarakat yang heterogen dari sisi agama dan etnis tidak selamanya meningkatkan intensitas konflik, tetapi juga mengurangi konflik itu. Terlihat jelas bahwa ragam pemikiran politik agama sangat mempengaruhi perilaku politik masyarakat sebab apa yang disebutkan ragam terakhir ini memang memiliki daya pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk perilaku politik masyarakat yang memang terkenal sangat menjunjung tinggi nilai agamanya.</p>	<p>terhadap beragamnya pemikiran politik. Beragamnya pemikiran politik ternyata berfungsi meredam konflik. Eksistensi pemikiran Islam ideologis dan substansial menunjukkan kekompakannya.</p>
<p>R. William Liddle dan Saiful Mujani,</p>	<p>Dikemukakan bahwa tidak lebih dari 15 % muslim Indonesia</p>	<p>Temuan ini, walaupun terkesan</p>

<p><i>“The Real Face of Indonesian Islam”</i></p>	<p>menginginkan negara Islam, 85 % moderat dan menolak negara Islam. Islam sebagai ideologi politik telah hilang dari bumi Indonesia. Lebih lanjut dikemukakan bahwa penyebab menurunnya dukungan muslim terhadap negara Islam adalah adanya perubahan hati (change of heart) dari para pemimpin NU dan Muhammadiyah.</p>	<p>ekstrim, namun memberikan kesan yang lebih kuat terhadap kecenderungan lebih pragmatis masyarakat muslim dalam memilih pada pemilihan umum.</p>
<p>Ramadhan Syariah, Pemikiran, Pandangan dan Perilaku Politik Masyarakat Muslim Pinggiran Kota Medan pada Pemilu 2009</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa pandangan dan perilaku politik masyarakat muslim pinggiran kota Medan pada pemilu 2009 paling tidak ditemukan ada lima pandangan dan perilaku politik, yaitu 1) pandangan dan perilaku politik uang; 2) pandangan dan perilaku politik aliran plus uang; 3) perilaku politik perjuangan ideologi; 4)</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan adanya beraneka ragam pemikiran politik Islam. Namun penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Islam ideologis kian memudar dan digantikan pemikiran politik yang</p>

	pandangan dan perilaku apatis politik; dan pandangan dan perilaku politik hiburan.	lebih pragmatis.
KPU kabupaten Simalungun Sumatera Utara, Perilaku memilih masyarakat (<i>voting behaviour</i>) di kabupaten Simalungun	Komisi Pemilihan Umum Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menunjukkan terjadinya peralihan memilih masyarakat Simalungun dari sebelumnya mereka memenangkan Partai Golkar beralih memenangkan Partai Demokrat. Perubahan orientasi politik masyarakat Simalungun ini disebabkan oleh orientasi rasional masyarakat berdasarkan sistem nilai, etika, moralitas dan agama.	Temuan ini, memberikan kesan yang lebih kuat terhadap kecenderungan lebih pragmatis masyarakat dalam memilih pada pemilihan umum.
Ahmad Jamhuri, " <i>Money Politics</i> " dan Implikasinya	Penelitian yang berjudul " <i>Money Politics</i> " dan Implikasinya terhadap Partisipasi Masyarakat	Temuan ini, memberikan kesan yang lebih kuat terhadap

<p>terhadap Partisipasi Masyarakat Kabupaten Cirebon pada Pemilu Legislatif 2014”</p>	<p>Kabupaten Cirebon pada Pemilu Legislatif 2014” menunjukkan suatu fenomena maraknya politik uang di kabupaten Cirebon pada pemilu legislatif 2014. Kemenangan para calon legislator cenderung ditentukan oleh faktor uang, termasuk dalam bentuk barang, seperti sembako dan lain-lain.</p> <p>Maraknya praktek <i>money politics</i> di kabupaten Cirebon pada pemilu legislatif 2014 tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; pertama sistem Pemilu <i>proportional representation</i> dengan varian daftar terbuka (<i>open list</i>), kedua, rendahnya tingkat pendidikan “politik” dan ketiga, faktor kemiskinan, kelemahan ekonomi.</p>	<p>kecenderungan lebih pragmatis masyarakat dalam memilih pada pemilihan umum. Dalam hal ini faktor materi, uang dan atau barang.</p>
<p>Muhamad Ramli,</p>	<p>Penelitian yang berjudul “Partisipasi</p>	<p>Temuan ini, memberikan</p>

<p>“Partisipasi Politik Masyarakat Desa Kadundung Kecamatan Labuan Amas Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Tahun 2010”.</p>	<p>Politik Masyarakat Desa Kadundung Kecamatan Labuan Amas Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Tahun 2010”, menunjukkan bahwa perilaku politik masyarakat desa Kadundung dalam pemilihan bupati langsung tahun 2010 dipengaruhi oleh faktor popularitas calon, status sosial ekonomi dan kondisi sosial politik.</p>	<p>kesan yang lebih kuat terhadap kecenderungan lebih pragmatis masyarakat dalam memilih pada pemilihan umum. Dalam hal ini faktor popularitas calon, status sosial ekonomi, dan kondisi sosial politik.</p>
<p>Rizky Hani, S.P, “Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilukada Tahun 2009 (Studi Kasus Desa Kragan</p>	<p>Penelitian ini menemukan fenomena yang menunjukkan bahwa partisipasi politik etnis Tionghoa dalam pemilukada tahun 2009 di desa Kragan kecamatan Kragan kabupaten Rembang adalah</p>	<p>Temuan ini, memberikan kesan yang lebih kuat terhadap kecenderungan lebih pragmatis masyarakat dalam memilih</p>

<p>Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang”</p>	<p>tergolong pasif dan kecenderungan peran mereka dalam pemilukada hanya ikut memilih dan sebagian ikut menjadi pihak sponsor dalam kampanye. Terdapat beberapa motif mereka melakukan partisipasi dan perubahan sosial kehidupan mereka terutama dalam aspek mobilitas sosial.</p>	<p>pada pemilihan umum. Dalam hal ini perilaku tidak memilih yang lebih disebabkan oleh faktor persepsi yang tidak memperoleh keuntungan apapun dalam kegiatan partisipasi memilih pada pemilihan umum.</p>
<p>Sarus, SP “Tingkat Kehadiran Pemilih dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih untuk Hadir Memilih pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Muna”.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pada pemilu legislatif tahun 2014 di kabupaten Muna tergolong rendah, tingkat kehadiran pemilih hanya 62,48%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih pada pemilu legislatif 2014 di</p>	<p>Temuan ini, memberikan kesan kecenderungan lebih pragmatis masyarakat dalam memilih pada pemilihan umum. Dalam hal ini perilaku tidak hadir memilih yang lebih</p>

	<p>kabupaten Muna meliputi empat Faktor. Pertama, faktor geografis seperti cuaca, jarak; kedua, faktor sosial ekonomi; ketiga, faktor psikologis; dan keempat, faktor rasional.</p>	<p>disebabkan oleh faktor kondisi geografis, sosial ekonomi, psikologis, dan rasional.</p>
<p>Yanto Supriyatno, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 (Survei pada Mahasiswa Universitas Islam "45" Tahun Angkatan 2014/2015)".</p>	<p>Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi perilaku memilih pemilih pemula saat pemilu legislatif tahun 2014. Beberapa faktor tersebut antara lain pertama, keinginan besar untuk merasakan pengalaman menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih yang pertama merupakan pengalaman yang luar biasa bagi para pemilih pemula. Faktor kedua, adalah faktor yang</p>	<p>Temuan ini, memberikan kesan kecenderungan lebih pragmatis masyarakat dalam memilih pada pemilihan umum. Dalam hal ini perilaku memilih pemilih pemula yang lebih disebabkan oleh faktor keinginan merasakan yang pertama, sedangkan faktor</p>

	mempengaruhi pilihan mereka, antara lain adalah faktor kampanye visual seperti iklan tv/radio, poster, spanduk, dan baliho; dan penelaahan perhatian mereka terhadap visi, misi dan program yang ditawarkan oleh kandidat legislatif.	memilihnya lebih disebabkan oleh faktor kampanye visual dan visi misi dan program calon legislatif.
Diah Setiawaty, "Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik yang Programatik",	Penelitian yang berjudul "Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik yang Programatik", melihat satu fenomena di mana tingkat partisipasi politik di Indonesia semakin menurun. Mengatasi masalah trend penurunan tingkat partisipasi politik ini diperlukan program pendidikan pemilih yang sistematis, terstruktur dan masif dengan ditunjang oleh	Temuan ini, memberikan kesan kecenderungan lebih pragmatis masyarakat dalam memilih pada pemilihan umum. Dalam hal ini perilaku memilih pemilih yang tak menggunakan hak pilihnya yang semakin meningkat. Konsep

	adanya informasi pemilih yang intensif menjelang pemilihan umum.	mengatasinya dengan program pendidikan pemilih yang sistematis, terstruktur dan masif.
RR Emilia dan Wawan Ichwanuddin, "Partisipasi politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014".	<p>Penelitian ini menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dan perilaku memilih pada pemilu 2014. Faktor-faktor pengaruh tersebut yaitu faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor pilihan rasional.</p> <p>Faktor sosiologis meliputi; pertama, dalam diri pemilih, ketaatan seseorang dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya tidak selalu memberikan pengaruh pada pilihan partai politiknya. Kedua, adanya janji-janji pemberian bantuan materi tidak</p>	<p>Temuan ini, memberikan kesan kecenderungan campuran antara ideologis/agama dengan kecenderungan pragmatis masyarakat dalam memilih pada pemilihan umum. Dalam hal ini perilaku memilih lebih disebabkan oleh faktor campuran, ideologis/agama masih berpengaruh walaupun kondisional.</p>

	<p>banyak mempengaruhi para pemilih dalam menentukan pilihannya. Ketiga, dalam menentukan pilihan politiknya, para pemilih pemula sering terpengaruh oleh pilihan orang-orang di sekitarnya seperti keluarga dan teman sekelompoknya. Faktor psikologis, diskusi politik di lingkungan keluarga, media terutama televisi; loyalitas yang rendah terhadap partai politik serta tidak adanya identitas kepartaian pada seseorang membuat orang mudah pindah pilihan partai politik. Memunculkan jarak ideologis antara pemilih dan partai politik. Faktor rasional/ekonomi, pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan isu yang strategis bagi mayoritas pemilih.</p>	<p>Faktor pragmatis/ekonomi berpengaruh pada kelompok sosial tertentu.</p>
--	--	--

<p>Putut Setyadhi, SE, "Perilaku Memilih (<i>Voting Behavior</i>) Pemilu Tahun 2014 di Kota Administrasi Jakarta Selatan".</p>	<p>Penelitian ini menemukan sejumlah poin kesimpulan yang menggambarkan kecenderungan perilaku memilih di kota Jakarta Selatan. Pertama, umumnya pemilih di Jakarta Selatan lebih banyak yang memberikan suara pada caleg daripada untuk partai politik. Kedua, temuan data hasil perolehan suara di Jakarta Selatan menunjukkan bahwa dukungan suara untuk caleg laki-laki lebih banyak daripada untuk caleg perempuan. Ketiga, partisipasi pemilih perempuan di Jakarta Selatan ternyata lebih tinggi daripada pemilih laki-laki. Gambaran partisipasi pemilih di Jakarta Selatan tersebut menunjukkan bahwa akses perempuan dalam</p>	<p>Temuan ini, tidak memberikan kesan kecenderungan faktor pengaruh pilihan pragmatis masyarakat dalam memilih pada pemilihan umum atau sebaliknya pengaruh yang bersifat ideologis. Penelitian ini hanya menggambarkan jenis pilihan masyarakat dalam pemilihan umum.</p>
--	--	--

	kegiatan pemilu relatif tidak ada persoalan.	
Sakir, Suranto, Awang Darumurti, Tunjung Sulaksono, "Pemetaan Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul".	Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang menentukan tingginya partisipasi masyarakat di kabupaten Bantul adalah a) afiliasi politik dengan orang terdekat; b) adanya stimulus partisipasi; c) adanya kontrol sosial yang ketat, sehingga perilaku tidak menggunakan hak pilih akan dianggap "ora umum"; d) pragmatisme politik masyarakat yang terkoordinasi oleh lembaga RT/Dukuh terjadi untuk mobilisasi pemilih; dan e) adanya kepedulian kelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.	Temuan ini, memberikan kesan kecenderungan lebih pragmatis masyarakat dalam memilih pada pemilihan umum. Dalam hal ini perilaku memilih masyarakat dipengaruhi oleh, ideologi, materi, budaya, dan kepemimpinan .
Tri Joko Waluyo,	Penelitian di pedesaan Riau ini menemukan	Temuan ini, memberikan

<p>Perubahan Orientasi Politik Masyarakat Air Tiris Kampar Riau dalam Pemilihan Umum terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus Pemilihan Umum 1999, 2004, 2009 dan 2014)</p>	<p>bahwa kecenderungan menjatuhkan pilihan berdasarkan aliran ideologi telah memudar. Semula masyarakat santri memang menjatuhkan pilihannya ke partai Islam, dari Masyumi, NU, Parmusi sampai Partai Persatuan Pembangunan. Namun dalam perkembangannya pertimbangan memilih mereka lebih ditentukan oleh isu-isu kontemporer, perubahan sistem pemilihan umum dan ketokohan, lebih menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pilihan pada pemilihan umum. Kondisi seperti ini, paling tidak, ditemukan pada masyarakat Air Tiris, kecamatan Kampar, kabupaten Kampar, provinsi Riau.</p>	<p>kesan kecenderungan lebih pragmatis masyarakat dalam memilih pada pemilihan umum. Dalam hal ini perilaku memilih, perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris terhadap partai-partai politik Islam, ditentukan oleh tiga faktor dominan, yaitu pertama, melemahnya kaitan antara identitas agama dengan perilaku memilih, melemahnya politik aliran, kedua identifikasi atau loyalitas masyarakat</p>
---	---	---

		santri terhadap partai-partai Islam telah memudar, dan ketiga, peranan dominan dari kelompok elit atau tokoh masyarakat.
--	--	--

1.6.2. Kerangka Teori

Untuk memahami kehidupan politik di pedesaan diperlukan alat analisa yang sesuai dengan struktur dan kultur masyarakat pedesaan. Dinamika partai politik pada masyarakat pedesaan yang ditandai dengan perubahan orientasi politik masyarakat, menjadi penelitian yang menarik sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan hak politik masyarakat pedesaan. Dinamika partai politik pada masyarakat pedesaan merupakan gerak kehidupan partai politik secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan partai politik dan orientasi politik tersebut pada masyarakat pedesaan.

Hal di atas mulai nampak, terutama sejak awal tahun 1998, di mana masyarakat mulai memperoleh kebebasannya yang signifikan untuk memperoleh hak politiknya sesuai dengan keinginan sendiri. Pemilihan umum pada tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014 dilaksanakan dalam suasana yang demokratis. Masyarakat

pedesaan, pada umumnya, melakukan hak memilihnya dengan bersemangat. Pemilihan umum yang diikuti oleh partai-partai politik pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok partai yang berdasarkan atau berideologi agama (Islam) dan kelompok partai yang tidak berdasarkan ideologi agama.

Masyarakat Air Tiris merupakan masyarakat yang homogin, seluruh masyarakatnya menganut agama Islam. Namun partai-partai politik Islam yang pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014 muncul beberapa partai politik Islam, PAN, PKS, PBR, PBB, dimenangi oleh partai-partai politik Islam yang berbeda. Pada pemilihan umum 1999 dan 2004 didominasi oleh partai politik Islam, namun kondisi pada pemilihan umum 2009 dan 2014 partai politik non keagamaan berganti mendominasi. Fenomena perubahan orientasi politik masyarakat ini menarik untuk dianalisa faktor-faktor penyebabnya, dengan menggunakan konsep dan teori yang sesuai, yang mampu mengarahkan kepada memperoleh jawabannya. Berkaitan dengan hal tersebut, pada bahasan teori ini akan dipaparkan hal-hal, konsep dan teori tentang partai politik, fungsi partai politik, sistem kepartaian dan perilaku politik.

1.6.2.1. Partai Politik

Untuk memahami perilaku politik masyarakat dalam pemilihan umum tidak dapat terlepas dari membicarakan sistem demokrasi dan partai politik. Para pakar ilmu politik telah sampai pada suatu aksioma bahwa tidak ada sistem politik yang dapat bertahan tanpa partai politik kecuali pada masyarakat tradisional dan beberapa masyarakat transisional. Kehidupan partai politik telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan dan merupakan alat

untuk memperoleh kekuasaan serta untuk memerintah.²⁴ Ia merupakan paket dari kehidupan demokrasi.²⁵

Di dalam memberikan pengertian mengenai partai politik, para sarjana melakukannya melalui berbagai pendekatan. Misalnya, Edmund Burke menjelaskan partai politik dari aspek tujuan pembentukan partai, Leon D. Epstein mendekati pengertian partai politik dari aspek karakteristiknya demikian pula Geovani Sartori. Sedangkan Maurice Duverger mendekati pengertian partai politik melalui struktur keanggotaan partai. Dan masih banyak sarjana lainnya, seperti, Samuel J. Eldersveld yang membicarakan partai politik dari aspek tingkah laku suatu kelompok sosial, dan yang lain-lain.

Pengertian partai politik dari para ahli tersebut di atas lebih lanjut diuraikan sebagai berikut. Dari aspek tujuan pembentukann partai politik, Edmund Burke mengemukakan bahwa partai politik adalah “... *a group of men who had agreed upon principle by which the national interest might be served* (partai politik tidak lain merupakan sekelompok manusia yang secara bersama-sama menyetujui prinsip-prinsip tertentu untuk mengabdikan dan melindungi kepentingan nasional)”²⁶

Dari aspek karakteristik, Leon D. Epstein mengemukakan bahwa “*political party is any group, however loosely organized, seeking to elect governmental office-holders under a given label*”.²⁷ (partai politik adalah

²⁴Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988), hlm. 18.

²⁵Bert F. Hoselitz (ed.), *Panduan Dasar Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1988), hlm. 324.

²⁶Edmun Burke, dalam Carlton Clymer Rodee, et.al., *Introduction to Political Science*, (Tokyo : Mc Graw-Hill Kogakusha, 1976), hlm. 317.

²⁷Lihat Michael G. Roskin, et.al., *Political Science, An Introduction*, New Jersey : Prentice Hall Engelwood Cliffs, Third Edition, 1988), hlm. 214.

suatu kelompok, bagaimanapun terorganisasi secara baik, berusaha untuk memperoleh jabatan-jabatan dalam pemerintahan dengan tanda yang diberikan). Dari sini nampak bahwa partai politik menunjuk pada suatu kelompok yang mengejar kedudukan pemerintahan, yang bersama-sama terikat pada identitas yang dimilikinya. Dengan identitas yang dimilikinya itu, partai politik setidaknya akan menunjukkan karakteristiknya, baik yang berkenaan besarnya, tingkat integritasnya, maupun jumlahnya.

Giovani Sartori²⁸, hampir senada dengan Epstein, mendefinisikan partai politik sebagai berikut: *“A party is any political group identified by an official label that presents at elections, and is capable of placing through elections (free or non free), candidates for public office”*. (Partai politik adalah kelompok politik yang ditandai dengan dengan label resmi yang mewakili dalam pemilihan umum, dan mampu menempatkan calon-calonnya dalam jabatan publik, melalui pemilihan umum (bebas atau tidak bebas). Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa partai politik ialah suatu kumpulan politik yang memiliki identitas tertentu, bebas ataupun tidak bebas, untuk menempatkan calon-calonnya dalam jabatan pemerintahan.

Sementara itu Maurice Duverger²⁹ memberikan suatu uraian tentang partai politik dengan lebih memfokuskan untuk mencari perbedaan karakteristik partai-partai politik itu sendiri bisa dilakukan dengan melihat struktur dan anatomi masing-masing partai politik. Mencari karakteristik partai-partai politik bisa dilakukan

²⁸Giovani Sartori, *Parties and Party Systems : A Framework for Analyzes*, (New York : Cambridge University Press, 1984), hlm. 63.

²⁹Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok Kepentingan*, (Jakarta : Bina Akasara, Terjemahan Laila Hasyim, 1984), hlm. 61

dengan memahami organisasi, kumpulan ahli, maupun aspek kepemimpinannya.

Berhubungan dengan karakteristik keanggotaan, Duverger membedakan antara partai kader (*cadre party*) dengan partai massa (*mass party*). Proses seleksi ahli-ahli dalam partai kader dilakukan dengan sangat ketat dan memperhatikan berbagai aspek, seperti ketrampilan, prestise, pengalaman politik, serta bobot pengaruhnya yang diharapkan bisa menarik pendukung-pendukung dalam pemilihan umum. Partai massa lebih kepada usaha mendapatkan jumlah anggota yang sebanyak-banyaknya dengan elit kepemimpinan yang dipilih secara ketat.

Seorang ahli lainnya, Samuel J. Eldersveld³⁰ membicarakan partai politik dari aspek tingkah laku suatu kelompok sosial dengan menariknya ke dalam aktivitas terpola menurut bentuk matriks sosial. Jika diinterpretasikan sebagai suatu organisme sosial, maka partai politik bisa memainkan peranan sebagai individu-individu di dalam suatu unit sosial yang bisa ditetapkan untuk kemudian bisa menerima dan mencoba menyelesaikan tujuan-tujuan tertentu yang bersifat lebih khas. Di samping itu partai politik yang bisa dipandang sebagai sistem politik “miniatur” dalam suatu struktur kekuasaan, pola-pola distribusi kekuasaan, proses perwakilan dan sistem pemilihan maupun dalam aktivitas pengambilan keputusan.

Untuk penegasan lebih lanjut mengenai pengertian partai politik, berikut dikemukakan beberapa batasan pengertian partai politik oleh beberapa pakar. Miriam Budiardjo³¹ mendefinisikan partai politik sebagai suatu

³⁰Samuel J. Eldersveld, *Political Parties : A Behavioral Analysis*, (Chicago : Rand Mc Nally & Co, 1964), hlm. 23

³¹Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta

kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Dilanjutkannya bahwa tujuan kumpulan ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Carl J. Friedrich³² menguraikan:

A political party is a group of human being, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages.

(Partai politik adalah suatu kelompok masyarakat, terorganisasi dengan tujuan pengamanan dan pemeliharaan bagi pemimpin-pemimpinnya untuk mengendalikan pemerintahan, dengan tujuan jangka panjang memberikan kepada anggota partai, melalui pengendalian dimana keuntungan ideologis dan materiil diperoleh).

Sarjana lainnya, Sigmund Neumann³³, menulis sebagai berikut:

A political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of governmental power and who complete for popular support with another group or groups holding divergent view.

PT. Gramedia, 1982), hlm. 160-161.

³²Carl J. Friedrich dalam Meriam Budiardjo, *Ibid.*, hlm. 161.

³³David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, (Jakarta : LP3ES, terjemahan, 1985), hlm. 352.

(Partai politik adalah organisasi artikulasi agen politik aktif masyarakat, yang menaruh perhatian terhadap kontrol kekuasaan pemerintahan dan yang lengkap untuk saling mendukung dengan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan).

Sementara itu dalam pandangan masyarakat kelurahan Air Tiris secara umum, partai politik merupakan simbol kebanggaan masyarakat simpatisannya atau para pemilihnya yang sedikit banyak diyakini bahwa memilih partai politik tersebut adalah merupakan bagian dari ibadah dan ingin memenangkannya dalam setiap kali pemilihan umum. Namun, pada umumnya mereka tidak banyak memahami arti dan fungsi partai politik dan pemilihan umum itu sendiri.³⁴ Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat kelurahan Air Tiris pada umumnya, pada mulanya, tidak memahami siapa calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai maupun program-program partai. Mereka hampir hanya mengenal pemimpin-pemimpin kelompok mereka sendiri. Namun mulai pemilihan umum 2004 mereka mulai mengenal siapa calon yang mesti dipilih dengan berubahnya peraturan pemilihan umum yang akhirnya calon legislatif merasa perlu untuk mengenalkan dirinya kepada masyarakat.

Seharusnya, partai politik berkembang untuk mewakili rakyat, mempengaruhi pergantian kepemimpinan politik baik lokal maupun nasional secara teratur dan damai, menyediakan akses bagi masyarakat kepada berbagai lembaga politik yang ada serta menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya politik dengan segala konsekwensi dan tanggung jawabnya³⁵.

³⁴Kesimpulan peneliti berdasarkan wawancara dengan 10 orang aktivis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kelurahan Air Tiris.

³⁵Ichlasul Amal, *Op. Cit.*, hlm. xiv

Dari berbagai pengertian dan rumusan yang telah dikemukakan dapat dikatakan bahwa partai politik pada dasarnya berhubungan dengan perjuangan mendapatkan kekuasaan dalam masyarakat atau negara. Oleh sebab itu, partai politik merupakan organisasi dari orang-orang yang mempunyai pandangan yang sama, berusaha mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Partai politik dalam penelitian ini adalah suatu kelompok politik yang memiliki identitas tertentu serta berusaha memenangkan pemilihan umum untuk menempatkan calon-calonnya dalam lembaga-lembaga legislatif dan pemerintahan serta mengabdikan dan melindungi kepentingan nasional. Aktif dalam kegiatan-kegiatan partai politik, dalam masyarakat Air Tiris, dipandang merupakan salah satu bagian dari beribadah.

1.6.2.2. Fungsi Partai Politik

Berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai politik, pembicaraan selanjutnya difokuskan pada fungsi partai politik. Fungsi partai politik pada dasarnya meliputi; pertama, sosialisasi politik, yaitu membimbing proses penanaman dan penyebaran nilai-nilai dan norma-norma politik. Kedua, partisipasi politik, yaitu memobilisasi warga negara ke dalam kehidupan dan kegiatan politik. Ketiga, rekrutmen politik, yaitu memilih dan menunjuk pejabat-pejabat politik dan pemerintahan. Keempat, komunikasi politik, yaitu menyampaikan informasi, isu, dan gagasan politik. Kelima, artikulasi kepentingan, yaitu membuat dan menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah. Keenam, agregasi

kepentingan, yaitu merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kumpulan-kumpulan yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-alternatif dasar kebijakan pemerintahan. Dan ketujuh, pembuatan kebijakan³⁶.

Pengertian partisipasi politik³⁷ adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Definisi partisipasi politik yang cukup senada disampaikan oleh Silvia Bolgherini. Menurut Bolgherini, partisipasi politik " ... a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a more or less direct way—legal, conventional, pacific, or contentious. ("... seperangkat kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan politik, bertujuan mempengaruhi kebijakan publik dengan menggunakan lebih kurang cara-cara langsung – sah, konvensional, tenang, atau bersifat memaksa.) Bagi Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung -- dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa.

Studi klasik mengenai partisipasi politik diadakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam karya penelitiannya *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Lewat penelitian mereka, Huntington

³⁶Lihat Mohtar Mas'ood dan Collin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 79-85.

³⁷setabasri01.blogspot.co.id/2009/partisipasi-politik.html

and Nelson memberikan suatu catatan: Partisipasi yang bersifat *mobilized* (dipaksa) juga termasuk ke dalam kajian partisipasi politik. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bolgherini yaitu bahwa dalam melakukan partisipasi politik, cara yang digunakan salah satunya yang bersifat paksaan (*contentious*). Bagi Huntington and Nelson, perbedaan partisipasi politik sukarela dan mobilisasi (diarahkan, senada dengan dipaksa) hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan: Intinya baik sukarela ataupun dipaksa, warganegara tetap melakukan partisipasi politik.

Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Sistem politik memiliki pengaruh untuk menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik warganegaranya. Pola partisipasi politik di negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal tentu berbeda dengan di negara dengan sistem Komunis atau Otoritarian. Bahkan, di negara-negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal juga terdapat perbedaan, seperti yang ditunjukkan Oscar Garcia Luengo, dalam penelitiannya mengenai *E-Activism: New Media and Political Participation in Europe*. Warganegara di negara-negara Eropa Utara (Swedia, Swiss, Denmark) cenderung lebih tinggi tingkat partisipasi politiknya ketimbang negara-negara Eropa bagian selatan (Spanyol, Italia, Portugal, dan Yunani).

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi:

1. kelas – individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.

2. kelompok atau komunal – individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
3. lingkungan – individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan.
4. partai – individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan
5. golongan atau faksi – individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

Model partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik. Model ini terbagi ke dalam 2 bagian besar : *Conventional* dan *Unconventional*.

Conventional adalah model klasik partisipasi politik seperti Pemilu dan kegiatan kampanye. Model partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. *Unconventional* adalah model partisipasi politik yang tumbuh seiring munculkan Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*). Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan (*environmentalist*), gerakan perempuan gelombang 2 (*feminist*), protes mahasiswa (*students protest*), dan teror.

Jika model partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

1. Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
2. Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
3. Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
4. Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
5. Tindakan Kekerasan (*violence*) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal. Sebab itu, penyuapan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini.

Partisipasi politik masyarakat di kelurahan Air Tiris cenderung pada partisipasi politik kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, yang merupakan model partisipasi politik konvensional. Partisipasi politik ini berlandaskan atas kelompok dan individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.

Orientasi politik adalah pertalian atau hubungan dengan paham politik tertentu.³⁸ Dalam kehidupan masyarakat Air Tiris, orientasi politik masyarakat lebih nampak pada pilihan mereka terhadap partai politik tertentu pada pemilihan umum. Ketika seseorang menjatuhkan pilihannya pada partai politik tertentu pada pemilihan umum berarti seseorang tersebut telah memiliki orientasi politik yaitu orientasi politik dengan partai politik tersebut. Dalam konteks pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014, masyarakat Air Tiris telah berganti-ganti melakukan orientasi politik, yang ditandai dengan silih bergantinya pemenang pemilihan umum.

1.6.2.3. Sistem Kepartaian

Pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk partisipasi politik masyarakat, sangat ditentukan oleh sistem kepartaian yang berlaku. Sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia pada prakteknya ialah sistem multi partai, yaitu suatu sistem politik dengan lebih dari dua partai politik. Namun sejak pemerintahan Orde Baru sistem multi partai ini cenderung mengarah kepada suatu sistem yang oleh Almond disebut sebagai sistem “satu partai dominan”. Pada mulanya sistem kepartaian ini merupakan

³⁸[https://glosarid.com/index.php/term/pengetahuan, afiliasi+poloitik-adalah.xhtml](https://glosarid.com/index.php/term/pengetahuan_afiliasi+poloitik-adalah.xhtml)

sistem banyak partai, tetapi dalam perkembangannya ada satu partai yang selalu memenangkan mayoritas suara dengan jauh meninggalkan yang lain sehingga walaupun pemilihan umum yang kompetitif selalu diadakan, hasilnya suara mayoritas selalu masuk ke dalam partai yang dominan itu³⁹. Sejak pemilihan umum 1971 Golkar selalu memenangkan mayoritas suara, sekaligus kemudian muncul sebagai partai dominan.

Dalam hal ini Afan Gaffar⁴⁰ menyatakan bahwa sejak diselesaikannya pemilihan umum 1971, Indonesia memasuki era baru dalam sistem kepartaian, yaitu era sistem kepartaian yang hegemonik. Dalam sistem kepartaian seperti ini, dengan didukung oleh kekuatan militer (baca: ABRI) dominasi Golkar sama sekali tidak terimbangi oleh partai politik lainnya dalam segala aspek kehidupan politik di Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem kepartaian hegemonik adalah sistem dimana tingkat kompetisi antara partai politik dibuat seminimum mungkin oleh partai hegemoni. Partai yang lainnya hanyalah sekedar diberi peluang untuk hidup dengan peranannya yang sangat peripheral. Kemungkinan akan adanya perubahan kekuasaan hampir tidak mungkin, karena hal itu memang tidak dimungkinkan munculnya oleh partai hegemoni⁴¹.

Sedangkan Giovanni Sartori⁴², dalam hal sistem partai hegemonik ini, menjelaskan sebagai berikut :

The hegemonic party neither allows for a formal nor a defacto competition for power. Other parties are permitted

³⁹Lihat Mohtar Mas'ood dan Collin MacAndrews, *Ibid.*, hlm. 91.

⁴⁰Afan Gaffar, "Partai Politik, Elit dan Massa dalam Pembangunan Nasional", dalam Ahmad Zaini Abar (Penyunting), *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru*, (Solo : CV. Ramadhani, 1990), hlm. 15.

⁴¹Afan Gaffar, *Ibid.*, hlm. 15.

⁴²Giovanni Sartori, *Op. Cit.*, hlm. 230

to exist, but as second class, licensed parties ; for they are not permitted to compete with the hegemonic party in antagonistic terms and on equal basis. Not only does alternation not occur in fact ; it cannot occur, since the possibility of a rotation in power is not even envisaged. The implication is that hegemonic party will remain in power whether it is liked or not. While the predominant party remains submissive to the conditions that make for a responsible government, not real sanction commits the hegemonic party to responsiveness. Whatever its policy, its domination cannot be challenged.

(Partai hegemonik tidak mengikuti kompetisi politik yang formal maupun nyata. Partai-partai lain tidak dibolehkan eksis, kecuali sebagai kelas kedua, partai-partai itu diijinkan; sementara mereka juga tidak diperbolehkan bersaing dengan partai hegemoni secara antagonistik dan dalam kesetaraan. Tidak hanya pergonta-gantian tak terjadi dalam kenyataan; hal itu tidak dapat terjadi, bahkan kemungkinan terjadinya rotasi kekuasaanpun tak pernah terbayangkan. Akibatnya adalah bahwa partai hegemoni akan tetap memegang kekuasaan terlepas dari suka atau tak suka. Sementara itu partai utama tetap bersikap tunduk pada keadaan yang menuju pemerintahan yang bertanggungjawab, sanksi yang tak nyata berlaku bagi partai hegemoni yang mampu memperhatikan. Apapun kebijakannya, dominasinya tidak tertandingi.)

Dari pendapat kedua pakar di atas, dapat dikatakan bahwa di dalam sistem kepartaian hegemonik, hegemoni selalu berada pada satu partai politik sementara partai-partai lainnya sekedar diberi kesempatan untuk hidup dan tidak dibenarkan berkompetisi secara antagonistik dengan basis yang sama. Dengan demikian partai hegemonik tetap

berkuasa, dan kemungkinan rotasi kekuasaan sangat minim. Sartori lebih lanjut menegaskan bahwa dalam sistem kepartaian yang hegemonis, “*not only alternation but the very premises of competition are ruled out*”. (... tidak hanya pergonta-gantian bahkan kompetisi yang beralasanpun dikesampingkan”.)

Sistem kepartaian yang hegemonik ini, menurut Afan Gaffar, telah dilaksanakan di Indonesia sejak Golongan Karya memenangkan pemilihan umum tahun 1971. Dikatakan selanjutnya bahwa ada empat faktor basis bagi hegemoni Golkar⁴³ ; pertama, terbentuknya aparat keamanan dan birokrasi yang dapat menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban negara; seperti : Kopkamtib, Opsus, dan lain-lain. Kedua, proses depolitisasi massa yang dilakukan secara sistematis sementara di lain pihak terjadi proses politisasi birokrasi yang tinggi, KORPRI merupakan salah satu elemen yang terbesar dalam Golongan Karya. Ketiga, proses emaskulasi atau pengebirian partai-partai politik yang non pemerintah terutama dalam kaitannya dengan rekrutmen elit partai yang harus bersifat akomodatif. Dan keempat, penciptaan sistem pemilihan umum dan aturan pemilihan umum yang sedemikian rupa guna menjamin agar Golongan Karya memenangkan pemilihan umum secara mutlak. Akibat sistem kepartaian yang hegemonik ini maka kedua partai politik lainnya, PPP dan PDI, senantiasa pada posisi peripheral karena tidak sanggup berkompetisi dengan Golkar sebagai partai hegemoni.

⁴³Afan Gaffar, “Partai Politik, Elit dan Massa dalam Pembangunan Nasional”, dalam Ahmad Zaini Abar (Penyunting), *Loc. Cit.*

Dalam hal hegemoni Golkar ini dapat dikaitkan dengan terbentuknya rezim otoriter birokratik yang cenderung otoritarian dan represif⁴⁴. Kecenderungan ini sangat dipengaruhi oleh krisis-krisis yang diwarisi dari rezim sebelumnya, misalnya terjadinya inflasi tajam dan hutang menumpuk, ketidakstabilan politik, percobaan kudeta dan lain-lain. Oleh karena itu, seterusnya rezim Orde Baru menerapkan “pembangunan sebagai ideologi” yang didasarkan pada: pertama, demokrasi politik harus didahului oleh pembangunan ekonomi; kedua, bersamaan dengan pembangunan ekonomi ini maka intensitas politik berdasarkan ideologi harus dikurangi atau bahkan dihilangkan. Dan ketiga, pelembagaan politik, dalam arti pemerintah harus menyalurkan tuntutan masyarakat dalam cara yang tertib⁴⁵.

Penerapan ideologi “Pembangunanisme” dalam sistem kepartaian di Indonesia berjalan cukup lancar. Pemilihan umum pertama masa Orde Baru diadakan pada tahun 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan satu Golongan Karya atau 10 organisasi peserta pemilihan umum, yaitu: PNI, NU, Parmusi, PSII, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, Murba, Perti, dan Golongan Karya. Pada pemilihan umum ini Golkar muncul sebagai pemenang mutlak dengan meraih 62,8 % suara, menyusul kemudian NU dengan 18,4 % suara, sedangkan 8 partai politik lainnya masing-masing memperoleh suara di bawah 7 %⁴⁶.

⁴⁴Rezim Otoriter Birokratik di Indonesia, lihat Mohtar Mas'oeed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1989).

⁴⁵Mohtar Mas'oeed, “Restrukturisasi Masyarakat Oleh Pemerintah Orde Baru di Indonesia”, dalam *Prisma*, (Jakarta : LP3ES, No. 7 Th. XVIII, 1989), hlm. 14-15.

⁴⁶Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1978), hlm. 76.

Munculnya Golkar sebagai pemenang mutlak dan kekalahan dramatis yang dialami 9 partai politik lainnya pada pemilihan umum 1971 tersebut memberi peluang bagi pemerintah Orde Baru untuk melancarkan ide penyederhanaan kepartaian yang telah dirintis sejak tahun 1970. Seperti diketahui, presiden Soeharto dalam pertemuannya dengan pimpinan 9 partai politik dan Golkar pada waktu itu mengemukakan saran-sarannya mengenai penyederhanaan fraksi di DPR menjadi 4 fraksi, yaitu fraksi ABRI, fraksi Karya Pembangunan, fraksi Materiil-Spiritual, dan fraksi Spiritual-Materiil.

Dalam posisi seperti itulah berlangsung fusi partai yang melahirkan PPP pada tanggal 5 Januari 1973, yaitu fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti; dan PDI yang merupakan fusi dari PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katholik pada tanggal 10 Januari 1973. Fusi partai ini selanjutnya dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dan ini berarti memantapkan eksistensi ketiga organisasi politik tersebut, yakni: PPP, Golkar, dan PDI dalam sistem kepartaian di Indonesia.

Hal yang menarik dari undang undang tersebut adalah ditetapkannya kepengurusan partai politik dan Golongan Karya hanya sampai pada daerah Tingkat II atau yang sederajat, sedang pada daerah kecamatan dan kelurahan atau kelurahan ditetapkan seorang komisaris yang dibantu oleh beberapa orang anggota. Komisaris dan para pembantunya bukan merupakan pengurus tersendiri akan tetapi hanya berfungsi sebagai pembantu pimpinan cabang yang berkedudukan pada daerah Tingkat II atau yang sederajat.

Dengan membatasi kepengurusan partai politik dan golongan karya seperti yang dimaksudkan dalam Undang-

Undang No.3 Tahun 1975, maka dengan undang-undang ini telah dilaksanakan konsepsi “*floating mass*” (masa mengambang), suatu konsep yang mengambangkan massa dari kehidupan politik.

Konsep ini pada mulanya dimaksudkan untuk memberikan pilihan yang lebih luas kepada rakyat dalam arti bahwa masyarakat tidak perlu terpolarisasi ke dalam ideologikultural tertentu dalam menentukan pilihannya. Mobilitas masa pada periode sebelumnya telah mengakibatkan masyarakat terkotak-kotak dalam ideologi sempit yang pada gilirannya melahirkan konflik di pedesaan. Dengan konsepsi massa mengambang ini diharapkan masyarakat pedesaan akan lebih memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah pembangunan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Pada kenyataannya pelaksanaan konsep ini telah melahirkan kesulitan tersendiri bagi partai politik, karena partai politik tidak dapat secara langsung membina massa pendukungnya. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara massa pendukung dengan partai politik yang didukung yang sangat berpengaruh dalam perolehan suara pada pemilihan umum.

Dalam perjalanan lebih lanjut, nampaknya penggabungan partai pada tahun 1973 itu tidak memuaskan penguasa politik Orde Baru di mana dasar pemikiran mengenai jumlah partai bukanlah satu-satunya faktor penting dalam proses penyederhanaan kehidupan partai politik. Hal ini ternyata disebabkan karena organisasi politik yang berjumlah tiga itu masih terlibat dalam konflik yang dianggap bisa membahayakan kehidupan politik.

Konflik politik yang terjadi pada masa kampanye pemilihan umum 1982 dipandang merupakan faktor utama bagi perlunya penyederhanaan partai dengan cara lain,

yaitu dengan penyederhanaan ideologi bagi organisasi-organisasi politik tersebut, walaupun Undang Undang Nomor 3 Tahun 1975 telah menetapkan dasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 di samping azas ciri menjadi ideologinya.

Untuk melaksanakan penyederhanaan ideologi ini kemudian dikeluarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Undang-undang baru ini menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi partai politik dan Golongan Karya. Hal ini dicantumkan pada pasal 2 yang berbunyi: "partai politik dan golongan karya berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas."

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi partai politik dan golongan karya, maka kekhususan partai politik dan golongan karya nampak pada pendekatan dan penekanan dalam pemikiran untuk memecahkan masalah-masalah yang luas yang dihadapi dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan hal ini akan tercermin dalam program masing-masing⁴⁷. Dijelaskan pula bahwa dengan dihapuskannya azas ciri bagi partai politik dan golongan karya maka partai politik dan golongan karya menjadi terbuka bagi seluruh warga negara Republik Indonesia.

Berbagai kebijaksanaan rezim Orde Baru telah menimbulkan permasalahan-permasalahan bagi partai-partai politik, terutama PPP, sebagai satu-satunya partai Islam. Permasalahan yang dihadapi PPP meliputi, pertama, akibat dari fusi partai segera diikuti konflik berkisar pada

⁴⁷Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 1985, Pasal 1, angka 4, dalam S. Supto Aje (ed.), *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1985 Tentang Pemilu*, (Semarang : Aneka Ilmu, 1985), hlm. 143.

perebutan pengaruh dan posisi antara Parmusi dan NU yang merupakan unsur-unsur terkuat dalam PPP. Konflik ini memuncak pada masa menjelang pemilihan umum 1982. Kedua, penerapan azas Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi parpol dan Golkar setidaknya memunculkan perdebatan dalam penerapan sikap dan tindakan, baik dalam kaitannya dengan intern partai maupun dalam kaitannya dengan rekrutmen massa. Ketiga, konflik intern PPP yang menimbulkan banyak kekecewaan di pihak NU tersebut telah mendorong NU keluar dari PPP pada tahun 1984 yang pada gilirannya “penggembosan PPP” dilakukan oleh NU pada pemilihan umum 1987⁴⁸.

Dengan pengaturan, penyederhanaan sistem kepartaian dan ideologi partai dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas memaksa PPP untuk melakukan penyesuaian, diantaranya mengganti tanda gambar Ka'bah menjadi Bintang sebagai lambang tanda gambar partai. Sebagai konsekuensi lebih lanjut, PPP dalam pemilihan umum 1992 dan 1997 tidak mengalami perkembangan dan bahkan mengalami kemunduran.

Keruntuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998, setelah munculnya gerakan reformasi, nampak memberi angin segar bagi kehidupan politik di Indonesia. Muncul kembali sistem kepartaian multi partai dan multi ideologi. PPP kemudian kembali menyatakan diri sebagai partai Islam dan kembali menggunakan tanda gambar Ka'bah sebagai lambang tanda gambar partai. Walau demikian, PPP, dalam pemilihan umum masa reformasi, pemilihan

⁴⁸Mengenai problema yang dihadapi PPP, lihat, Alfian dan Nazaruddin Syamsuddin (ed.), *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*, (Jakarta : CV. Rajawali dan AIPI, 1988), hlm. 85-103. Lihat juga, Ridwan Saidi, *PPP dan Politik Orde Baru*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1991).

umum 1999, 2004, 2009 dan 2014, tidak mengalami perkembangan yang signifikan dan cenderung mengalami stagnasi.

Melihat perkembangan sistem kepartaian tersebut di depan, menunjukkan dinamika partai politik yang dinamis. Partai Golongan Karya tetap muncul sebagai partai besar, PDI yang kemudian berubah menjadi PDIP mengalami kenaikan yang signifikan, muncul partai-partai politik menengah baru, sementara PPP sebagai partai lama tidak mengalami perkembangan yang berarti.

Sejak reformasi, sistem kepartaian Indonesia cenderung pada sistem multi partai. Sejak tumbangnya rezim Orde Baru, rezim multi partai dengan satu partai dominan, pada tahun 1998, sistem kepartaian Indonesia mengarah kepada sistem multi partai. Sistem multi partai ini kemudian memunculkan puluhan partai politik, baik partai politik lama maupun partai politik baru, yang mengikuti pemilihan umum pada tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014.

1.6.2.4. Perilaku Politik

Perolehan suara yang fluktuatif partai-partai politik dalam pemilihan umum adalah merupakan hal yang biasa terjadi. Perolehan suara tergantung kepada situasi dan kondisi saat pemilihan umum dilaksanakan. Terutama kondisi struktur elit yang masih sangat menentukan, kemampuan rekrutmen partai-partai politik dan strategi pemanfaatan isu-isu politik yang berkembang.

Perilaku memilih (*voting behavior*) sudah sejak lama menjadi pusat perhatian para ahli ilmu politik di Amerika. Mereka membahas, meneliti dan memperdebatkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang memilih partai politik tertentu, misalnya mengapa seseorang memilih partai

Demokrat, dan yang lainnya memilih partai Republik. Secara konvensional, dalam hal ini, terdapat banyak faktor yang dianggap mempengaruhi perilaku memilih seseorang, seperti sikap terhadap partai dan calon (*candidate*), isu-isu, loyalitas terhadap partai, ideologi, hukum (aturan) pemilihan (*election laws*), keanggotaan dalam kelompok sosial, jabatan, pendidikan, jenis kelamin, usia, penampilan partai dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut selaras dengan yang disinyalir oleh Paul Allen Beck:

*The american voter employs virtually all of the concepts conventionally drawn upon in analyzing voter choice; attitudes toward parties, candidates, and issues, party loyalties, ideology, election laws, social group membership, social class, economics outlooks, fare condition, geographical mobility, education, incupations, sex, personallity, party performance, in managing government; and turnout*⁴⁹.

(Pemilih Amerika menggunakan seluruh konsep secara konvensional dalam melakukan analisa pilihan pemilih; sikap terhadap partai, para calon, dan isu-isu, loyalitas kepartaian, ideologi, peraturan-peraturan tentang pemilihan umum, keanggotaan dalam kelompok masyarakat, kelas sosial, pandangan ekonomi, kondisi harga, mobilitas geografik, pendidikan, inkupasi, jenis kelamin, kepribadian, profil partai, dalam mengelola pemerintahan; dan kehadiran.)

Dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih ini sekelompok ilmuwan yang tergabung dalam

⁴⁹Paul A. Beck, "*Choice, Contex and Consequence : Beaten and Unbeaten Path Toward, Science of Electoral Behavior*", dalam Herbert F. Weisberg, *Political Science and the Science of Politic*, (New York : Agathon Press Inc., 1986), hlm. 243

Michigan School menyederhanakan menjadi enam; yaitu identifikasi partai, persepsi pemilih terhadap atribut-atribut pribadi masing-masing calon, kepentingan kelompok yang mereka wakili, isu-isu politik dalam negeri, isu-isu politik luar negeri dan penampilan partai dalam mengelola pemerintahan. Pandangan kelompok *Michigan School* tersebut dapat dilihat dalam tulisan Paul A. Beck :

*The perceptions of parties and candidates in the elections context are analyzed first in the american voters indicates their causal priority in the Michigan Model. Out of this initial focus flow the familiar six components of electoral decision : voter perceptions of personal attributes of each candidate, the group interests they represent, domestic, issues, foreign policy issues and performance of the parties as managers of government*⁵⁰.

(Persepsi partai dan calon dalam pemilihan umum dianalisa pertama para pemilih Amerika menandai prioritas mereka dalam Model Michigan. Di luar fokus ini dikenal enam komponen keputusan memilih: persepsi pemilih terhadap kelengkapan pribadi dari masing-masing calon, kepentingan kelompok dimana mereka mewakili, isu-isu domestik, isu-isu politik luar negeri dan performan dari partai sebagai pengelola pemerintahan.)

Enam faktor yang mempengaruhi *voting behavior* (perilaku memilih) sebagaimana yang dikemukakan oleh kelompok *Michigan School* tersebut di atas dapat dikategorikan menjadi *long-term factor* (faktor jangka panjang) seperti faktor identifikasi partai (*party identification*) dan *short term factor* (faktor jangka pendek)

⁵⁰Paul A. Beck, "*Choice, Context and Consequence : Beaten and Unbeaten Path Toward, Science of Electoral Behavior*", dalam Herbert F. Weisberg, *Ibid.*, hlm. 244.

seperti persepsi terhadap atribut – atribut pribadi calon (*candidates*), isu politik dalam negeri, isu politik luar negeri dan sebagainya. Di antara faktor jangka panjang dalam penelitian ini lebih menekankan peranan identifikasi partai dalam mempengaruhi *voting behavior* dari pada faktor jangka panjang yang lain (seperti ideologi).

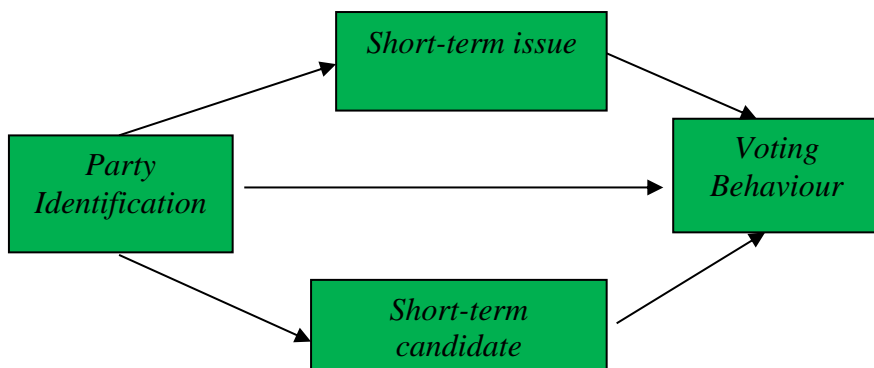
Alasan yang dikemukakan adalah karena identifikasi partai terbentuk sejak masih kecil seseorang jauh sebelum kognisi (pengetahuan) tentang isu dan ideologi itu berkembang. Sehingga identifikasi partailah yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap posisi isu dan ideologi dan identifikasi partailah yang oleh kelompok Michigan School dianggap memiliki pengaruh langsung terhadap *voting behavior*, terutama apabila faktor–faktor jangka pendek (*short-term factors*) sebagaimana yang disebutkan di atas seimbang di antara calon–calon yang ada, sebagaimana disinyalir Paul A. Beck⁵¹ :

The Dismissal of ideological and issue voting leaves party identification as the key-longterm forces of direct political relevance in The Michigan model. Further support for this come from the significant relationship in the early studies between party and both issue position and ideology. Assuming that party identification are formed are the most part during childhood long before – cognition of issues and ideology developed, these relationships are attributed to the causal influences of party on isu positions and ideology. And of course party identification itself has direct impact on the vote, especially when the shortterm forces are balanced between the candidates.

⁵¹Paul A. Beck, “Choice, Context and Consequence : Beaten and Unbeaten Path Toward, Science of Electoral Behavior”, dalam Herbert F. Weisberg, *Ibid.*, hlm. 246-247.

(Penolakan ideologi dan isu pemilihan meninggalkan identifikasi partai sebagai kekuatan kunci dari relevansi politik langsung dari Model Michigan. Dukungan lebih lanjut untuk ini datang dari hubungan signifikan di masa awal pengkajian antara partai dan kedua isu posisi dan ideologi. Anggapan identifikasi kepartaian yang terbentuk merupakan bagian terpenting selama masa kanak-kanak yang panjang – ingatan akan isu dan ideologi yang berkembang, hubungan-hubungan ini melengkapi pengaruh partai dalam isu posisi dan ideologi. Dan tentu saja identifikasi kepartaian sendiri memiliki pengaruh langsung pada pemilihan umum, khususnya ketika kekuatan-kekuatan jangka pendek seimbang di antara para calon.)

Model Michigan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Dari model di atas dapat ditarik pengertian bahwa : pertama, dengan mensinyalir adanya hubungan antara

identifikasi partai (*party identification*) yang cukup signifikan dengan posisi isu dan ideologi, maka secara implisit *Michigan model* berpendapat bahwa model sosiologi (*sociological model*) saja tidak cukup untuk dapat menjelaskan perilaku memilih (*voting behavior*).

Kedua, dengan mensinyalir bahwa identifikasi partai itu mempunyai pengaruh langsung terhadap *voting behavior*, maka secara implisit *Michigan model* berpendapat bahwa *voting behavior* itu merupakan fungsi atau produk dari identifikasi partai. Model itu mempunyai kelemahan – kelemahan, yaitu : (1) Model Michigan ini hanya menekankan pengaruh satu arah (*one way influence*). *Party identification* dianggap sebagai *independent variable* yang mempengaruhi *short-term issue* dan *short-term candidate* dan sekaligus mempengaruhi perilaku memilih (*voting behavior*), sehingga cenderung mengabaikan pengaruh balik (*feedback influence*), (2) pengaruh langsung yang dikemukakan model ini bisa saja menjadi pengaruh tidak langsung (*indirect influences*), karena identifikasi partai itu mempengaruhi *short-term issue* dan *short-term candidate*, dan baru kemudian mempengaruhi *voting behavior*, (3) identifikasi partai tidak selamanya menjadi *independent variable*, tapi bisa juga menjadi *dependent variable*.

Dengan adanya kelemahan–kelemahan tersebut, maka pakar politik berusaha untuk memperbaiki model yang dikembangkan *Michigan School* itu, misalnya Fiorina berpendapat bahwa identifikasi partai itu merupakan keputusan yang berkembang berdasarkan pada identifikasi partai terdahulu (*past party identifications*), penilaian–penilaian penampilan masa lalu (*retrospective evaluations*

of performance) dan harapan–harapan dimasa datang (*future expectations*)⁵².

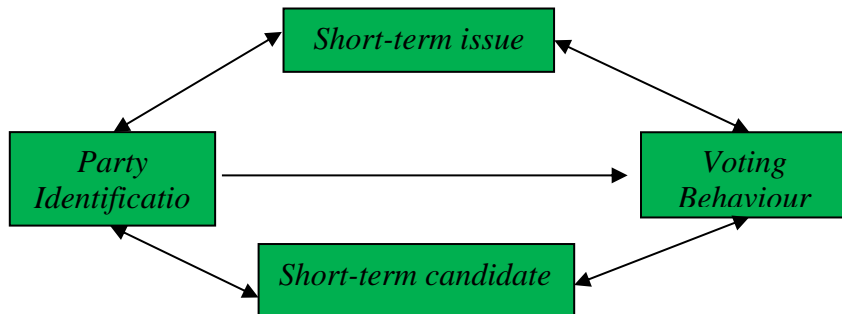
Dengan demikian juga identifikasi partai itu bersifat dinamis (berkembang) dari waktu ke waktu sesuai dengan interaksi antara *post party identification* dengan harapan–harapan seseorang (*future expectation*). Identifikasi partai itu dapat berkembang menjadi kuat dan sebaliknya bisa melemah tergantung pada isu jangka pendek yang berkembang dan dapat mempengaruhi harapan–harapan seseorang.

Sifat identifikasi yang dinamis dan berkembang tersebut selaras dengan pendapat Jackson yang mengatakan bahwa antara identifikasi partai dan faktor jangka pendek (*short term issue* dan *short term candidate*) terjadi hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal relationship*)⁵³.

Dengan demikian identifikasi partai (*party identification*) bukanlah semata–mata merupakan variabel yang mempengaruhi faktor jangka pendek (*shorter forces*) sebagaimana yang dikatakan oleh *Michigan School*, melainkan identifikasi partai dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor jangka pendek (*shortterm forces*). Sehingga identifikasi partai dapat mempengaruhi *shortterm issue* dan *shortterm candidate*, dan sebaliknya *shortterm issue* dan *shortterm candidate* dapat mempengaruhi identifikasi partai. Hubungan saling mempengaruhi seperti ini terjadi juga antara faktor jangka pendek itu dengan *voting behavior*. Jadi model yang telah diperbaiki itu dapat digambarkan sebagai berikut :

⁵²Morris F. Viorina, *Retrospective Voting in American National Elections*, (New York : Edward Brothers Inc., 1981), hlm. 601.

⁵³Karl D. Jackson, *Political Power and Communication in Indonesia*, (California: University of California Press, 1978), hlm. 161-185.



Dilihat dari bentuk partisipasi politik, sebagian besar bentuk partisipasi politik para pemilih di Amerika dapat dikategorikan ke dalam tipe yang partisipan. Hanya sebagian kecil yang dapat tergolong ke dalam bentuk partisipasi yang subjek atau parochial. Hanya sebagian kecil yang dapat digolongkan ke dalam bentuk subjek dan parochial⁵⁴. Sebaliknya sebagian besar bentuk partisipasi para pemilih di Negara sedang berkembang seperti Indonesia, terutama pada masa berlakunya sistem politik massa mengambang, masih tergolong kedalam tipe partisipasi politik parochial atau subjek dari pada yang partisipan. Namun demikian, sejak reformasi politik dilakukan, mulai pemilu 1999, bentuk partisipasi politik di Indonesia mulai bergeser ke arah yang lebih partisipan.

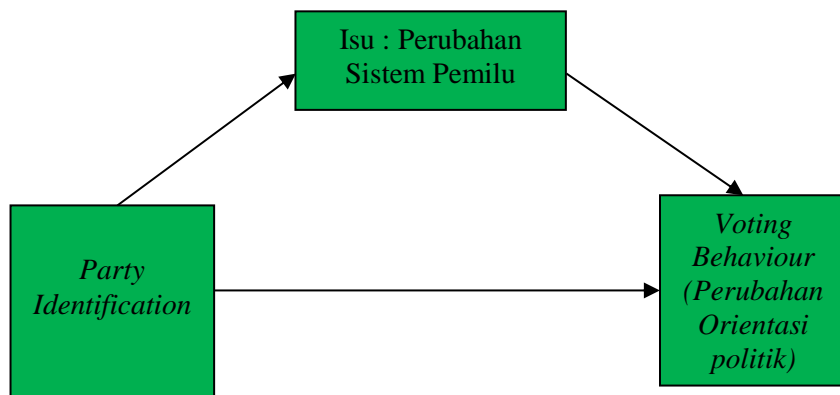
Kalau Almond dan Verba membuat polarisasi budaya politik partisipan, subjek dan parochial, maka Huntington membagi partisipasi politik menjadi otonom

⁵⁴Lihat Gabriel A. Almond and Sydney Verba, *The Civic Culture*, (California: Little Brown and Co., 1965).

(*autonomous political participation*) dan partisipasi yang tidak otonom (*mobilized political participation*)⁵⁵.

Partisipasi sebagian besar para pemilih di Negara–Negara maju seperti di Amerika, lebih otonom dan didasari kesadaran untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik, sedangkan di Negara–Negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, pola partisipasi warganya lebih banyak yang termobilisir daripada yang otonom.

Mengingat perbedaan kontekstual dan kondisi–kondisi yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum 1999, pemilihan umum 2004, pemilihan umum 2009 dan pemilihan umum 2014 maka model yang akan penulis kembangkan perlu melakukan penyesuaian. Dalam penelitian ini model yang penulis kembangkan dapat digambar sebagai berikut :



⁵⁵Lihat juga Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson, *No Easy Choice : Political Participation in Developing Countries*, (Harvard: Harvard University Press, 1976).

Karena identifikasi seseorang terhadap suatu partai erat kaitannya dengan persepsi seseorang tentang partai tersebut, maka perlu dirumuskan definisi mengenai persepsi. Dalam hal ini banyak sarjana yang telah mengkaji mengenai persepsi, diantaranya Jalaludin Rakhmat mengatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan–hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi ini dan menafsirkan pesan⁵⁶. Senada dengan definisi tersebut James W.V. Zanden⁵⁷ mengatakan : *Perception is the process by which we gather and interpret information. It serves as the mediating link between us and our environment.* Sementara itu secara lebih jelas lagi Lester D.Grow dan Alice Grow⁵⁸ berpendapat bahwa *perception is the process of organizing and our experiences.*

Kalau diperhatikan ketiga definisi tersebut, maka dapat ditarik pengertian yaitu bahwa persepsi adalah hasil interaksi antara seseorang dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun non fisik (nilai–nilai, kepercayaan dan sebagainya) melalui proses pemahaman, interpretasi (dengan menggunakan kemampuan inderawi) terhadap lingkungan tersebut.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa persepsi itu dibentuk oleh dua faktor, yaitu : lingkungan fisik dan lingkungan non fisik (nilai–nilai, norma–norma, sistem kepercayaan dan lain–lain). Menurut Jalaluddin Rachmat faktor tersebut disebut faktor personal atau faktor

⁵⁶Jalaluddin Rachmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung:CV. Remaja Karya, 1985), hlm. 63.

⁵⁷James W. Vander Zanden, *Social Psychology*, (New York: Random House Inc., 1984), hlm. 33.

⁵⁸Lester D. Grow and Alice Grow, *General Psychology*, revised Edition, (Ottawa, New Jersey: Little Field, Adam and Co., 1973), hlm. 93.

situasional⁵⁹, atau disebut juga sebagai faktor fungsional dan faktor struktural⁶⁰. Sedangkan Miftah Thoha menyebut ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain tergantung kepada proses pemahaman seseorang terhadap sistem nilai dan kepercayaan yang sedang berlaku, sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan⁶¹.

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan batasan persepsi sebagai suatu proses penafsiran seseorang terhadap objek tertentu diluar dirinya yang dilukiskan dalam batas-batas kesadaran tertentu dan didasarkan pada pengalaman masa lalunya. Pada masa perkembangan berikutnya persepsi yang telah terbentuk tadi akan dapat mempengaruhi sikap dan perilakunya terhadap objek yang sebelumnya dipersepsikan itu.

Jadi salah satu hal yang mempengaruhi persepsi seseorang tentang sesuatu objek adalah sistem nilai atau sistem kepercayaan yang sedang berlaku dalam lingkungan dimana orang tersebut hidup dalam suatu masyarakat. Sistem nilai dan sistem kepercayaan yang telah tertanam dan dialami sejak masa kanak-kanak itu akan mempengaruhi persepsinya ketika ia menjadi dewasa (remaja). Persepsi yang telah terbentuk ini pada gilirannya akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang, termasuk identifikasinya dengan objek-objek tertentu, misalnya terhadap partai politik. Seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan sistem nilai yang islami akan mengidentifikasi dirinya dengan organisasi politik yang berdasarkan Islam. Sebaliknya seseorang yang dibesarkan

⁵⁹Jalaluddin Rachmat, *Loc. Cit.*

⁶⁰Jalaluddin Rachmat, *Ibid.*

⁶¹Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi, Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 135.

dalam lingkungan sistem nilai yang kurang lebih bersifat sekuler juga akan mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi politik yang bersifat sekuler.

Studi Donald K. Emerson tentang elit di Indonesia yang menemukan bentuk sosialisasi dan partisipasi politik yang berbeda antara elit santri dengan elit abangan memperkuat pernyataan tersebut di atas⁶². Golongan santri yang dibesarkan dalam lingkungan sistem nilai dan sistem kepercayaan yang islami cenderung melibatkan dirinya dalam organisasi sosial-politik yang kurang lebih bernafaskan Islam (Masyumi, NU, Parmusi, PPP dan lain sebagainya). Sebaliknya golongan abangan yang dibesarkan dalam lingkungan sistem nilai dan sistem kepercayaan yang kurang lebih bersifat sekuler cenderung melibatkan dirinya dalam organisasi sosial-politik yang kurang lebih bersifat sekuler (PNI, Golkar, PDI dan sebagainya)⁶³. Demikian juga studi Afan Gaffar mengenai perilaku politik orang Jawa (1984) menunjukkan adanya hubungan yang positif antara sosialisasi nilai-nilai dengan identifikasi partai maupun perilaku politik (memilih) seseorang⁶⁴.

Studi tentang perilaku politik masyarakat di Indonesia telah dilakukan banyak sarjana. Perilaku politik masyarakat Jawa telah banyak dikaji oleh para pakar, seperti William Liddle, Karl D. Jackson, Afan Gaffar dan ahli-ahli lainnya. Dalam penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat Jawa Barat dalam kasus Darul Islam,

⁶²Lihat Afan Gaffar, Partai Politik, Elit dan Massa dalam Pembangunan Nasional, dalam Ahmad Zaini Abar, *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru*, (Solo: CV. Ramadhani, 1990).

⁶³Afan Gaffar, *Ibid.*, hlm. 31.

⁶⁴Afan Gaffar, *Javanese Voters : A Case Study of Election under a Hegemonic Party System*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992).

Jackson mengatakan bahwa faktor kritikal terhadap mayoritas luas yang tinggi di desa-desa adalah bahwa keputusan-keputusan telah dibuat bagi mereka oleh para atasan mereka di dalam hubungan “unggul-asor” (*superior-subordinate*) yang telah dibina sebelumnya yang mendominasi kehidupan sosial mereka dan pandangan itu mendominasi kehidupan politik mereka.

Tindakan utama keikutsertaan bagi seseorang adalah tali silaturahmi dengan para tokoh kewibawaan tradisional, dari siapa ia akan memperoleh dorongan perasaan, keamanan sosial, nasehat rohani, perlindungan fisik, penglibatan birokrasi dan arah politik. Sekali seorang tokoh kewibawaan tradisional memantapkan dirinya sendiri, maka hubungannya dengan para pengikut berlangsung berpuluh-puluh tahun. Dan kebanyakan kekuasaan pengambilan keputusan para pengikutnya dipindahkan secara efektif kepada siapa ia telah membentuk hubungan dwitunggal (*dyadic*), pribadi yang pada mulanya bukan politik. Keputusan-keputusan individu, menurut teori ini, tidaklah berdasarkan atas pengetahuan politik, kepercayaan agama atau kepercayaan ideologi para pengikut perseorangan, melainkan atas tempat yang diduduki seseorang dalam struktur hubungan kewibawaan tradisional tertentu yang terus menerus⁶⁵.

Sementara itu Afan Gaffar⁶⁶ menerangkan bahwa perilaku politik masyarakat Jawa dalam kaitannya dengan memilih pada pemilihan umum sangat dipengaruhi oleh ideologi dikhotomi santri abangan yang diperkenalkan oleh Clifford Geertz, di mana masyarakat santri akan memilih partai Islam atau yang memperjuangkan simbol-simbol

⁶⁵Karl D. Jackson, *Political Power and Communication in Indonesia*, (California: University of California Press, 1978).

⁶⁶Afan Gaffar, *Op. Cit.*

keislaman, sedangkan abangan akan menjatuhkan pilihan pada partai sekuler atau partai-partai bukan Islam.

Untuk memahami perilaku politik masyarakat kelurahan Air Tiris akan diarahkan dan mengacu pada pola kultur politik masyarakat Jawa. Bila mengikuti pola aliran yang dikemukakan Geertz bahwa kaum santri adalah *who takes as their man pattern way of life orientation, a set of beliefs values and expressive symbols based primarily on Islamic doctrine*⁶⁷, maka masyarakat Air Tiris dapat dikatakan bahwa kaum santri merupakan bagian terbesar atau mayoritas. Mereka, pada umumnya, berusaha melandasi kehidupannya pada ajaran Islam. Tingkah laku sosial politik mereka mencerminkan ajaran agama Islam. Mereka mempercayai semangat ukhuwah Islamiyah, dan salah satu perwujudan ukhuwah tersebut adalah berafiliasi, bergabung atau mendukung partai atau organisasi-organisasi sosial yang menunjukkan simbol-simbol Islam.

Sejalan dengan kondisi masyarakat Air Tiris tersebut di depan, dapat dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku politik mereka. Pertama, kepercayaan keagamaan (politik aliran). Masyarakat santri, termasuk masyarakat Air Tiris, akan mendukung dan memilih partai politik yang secara ideologi berdasarkan Islam. Mereka memandang bahwa agama Islam memberikan bimbingan secara individual dan juga kepada para pemimpin yang meliputi seluruh aspek kehidupan, dan tidak mengenal pemisahan agama dan politik.

Dengan demikian, pada masyarakat santri, hubungan antara agama dan politik sangat erat, bahkan tidak terpisahkan. Bagi santri, memeluk Islam secara sempurna berarti juga mendukung organisasi sosial dan

⁶⁷Afan Gaffar, *Op. Cit.*

politik yang berusaha memperjuangkan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Hal ini lebih menjelaskan bahwa faktor agama merupakan salah satu dasar identifikasi seseorang dengan partai politik tertentu, sehingga kaum santri akan mengidentifikasi dirinya dengan partai politik yang mencerminkan nilai-nilai Islam, atau paling tidak partai yang berusaha mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.

Faktor kedua yang dapat menjelaskan tingkah laku politik masyarakat pedesaan adalah identifikasi partai, loyalitas kepartaian. Konsep identifikasi partai ini sangat penting karena merupakan hal utama seseorang dalam menentukan pilihan dalam pemilihan umum. Identifikasi partai berhubungan erat dengan kejiwaan seseorang dalam mengkaitkan dirinya dengan partai politik atau organisasi politik tertentu. Hubungan kejiwaan tersebut telah berkembang sejak awal dalam kehidupannya melalui proses sosialisasi politik, yaitu suatu proses penyebaran nilai-nilai dan norma-norma dari generasi ke generasi. Peranan para perantara seperti orang tua, saudara-saudara kandung, kawan-kawan sebaya, sekolah dan organisasi sosial-politik sangat penting dalam mengolah dan menyebarkan nilai-nilai dan norma-norma politik dalam masyarakat.

Dalam hal ini, Donald K. Emmerson⁶⁸, dalam studinya mengenai elit Indonesia, mendapatkan proses sosialisasi politik yang berbeda antara elit santri dan abangan. Emmerson menunjukkan jalur-jalur yang berbeda yang dilalui oleh masing-masing kelompok elit selama masa-masa perkembangan anak-anak dan berikut masa dewasa. Kaum abangan didorong terlibat dalam kegiatan-

⁶⁸Donald K. Emmerson, *Op. Cit.*

kegiatan yang mencerminkan dunia Jawa Hindu dalam organisasi-organisasi nasionalis sekuler, sementara itu kaum santri cenderung bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang mencerminkan dunia Islam, memasuki pesantren atau organisasi sosial politik Islam. Melalui proses ini identifikasi dengan partai politik tertentu berkembang secara intensif, walaupun dalam beberapa kasus mengalami kemunduran.

Mengenai konsep dan pengertian identifikasi partai, para sarjana ilmu politik Amerika telah sejak lama mengembangkannya, Herbert Asher⁶⁹ memandang identifikasi partai itu sebagai *commonly viewed as psychological attachment or feeling of loyalty to a political party that developes during childhood and become more intense the longer one is identified with that party*. Sementara itu dalam studinya Campbell⁷⁰ dan kawan-kawan melihat dan memaknai identifikasi partai itu sebagai: *The individual's affective orientation to an important group object in the environment, the political party serves as the group toward which the individual may develop an identification positive or negative of some degree of intensity*.

(Orientasi afektif individual sebagai tujuan kelompok yang penting dalam lingkungan itu, partai politik melayani kelompok tersebut di mana individu mungkin berkembang sebagai identifikasi positif atau negatif untuk beberapa tingkat intensitas.)

Dari beberapa pandangan para pakar tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa identifikasi partai itu

⁶⁹Herbert Asher, *Presidential Election in American Politics*, (Illionis: The Dorsey Press, 1980), hlm. 56.

⁷⁰Angus Campbell, at all, *The American Voters : Unabridged Edition*, (Chicago: Jhon Willey and Sons Inc., 1960), hlm. 121.

merupakan kesetiaan psikologis atau loyalitas seseorang terhadap partai politik tertentu. Kesetiaan dan loyalitas semacam ini berkembang sejak dini dalam kehidupan sosial seseorang melalui proses sosialisasi politik, yaitu proses penanaman nilai-nilai dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, lembaga sosialisasi politik seperti keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, maupun organisasi politik memiliki peranan yang penting dalam proses penanaman nilai-nilai tersebut⁷¹.

Identifikasi partai yang telah terbentuk melalui proses sosialisasi itu merupakan faktor yang menentukan perilaku *voting* (perilaku memilih) seseorang, seperti yang dikatakan oleh John H. Kassel⁷² bahwa :

Party identification is the individual's standing decision to support one party or another. (Identifikasi partai adalah keputusan individu untuk mendukung salah satu partai atau yang lain). Secara lebih tegas lagi John E. Chubb⁷³ mengatakan bahwa *American voters have a long standing tendency to identify with one of the major party to think themself as democrat or republican, and vote for that party is most election for most office.* (Pemilih Amerika mempunyai kecenderungan tetap yang lama untuk mengidentifikasi dengan salah satu partai besar, demokrat atau republik, dan memilih partai itu dalam setiap pemilihan umum).).

Dengan demikian seseorang yang sesuai dengan proses sosialisasi politiknya dan kemudian mengidentifikasi dengan partai politik tertentu, misalnya partai Republik, dan

⁷¹Afan Gaffar, *Op. Cit.*

⁷²Jhon H. Kassel, *Presidential Campaign Politic*, (Illionis: The Dorsey Press Homewood, 1984), hlm. 278.

⁷³John E. Chubb and Paul E. Peterson, *The Direction in American Politic*, (Washington: The Brooking Institution, 1985), hlm. 9.

sebaliknya seseorang yang mengidentifikasi dirinya dengan partai Demokrat maka orang tersebut juga cenderung akan memilih partai Demokrat. Dengan kata lain identifikasi partai merupakan faktor yang menentukan (*determinant factor*) bagi perilaku *voting* (perilaku memilih) seseorang.

Akan tetapi tidak semua pakar setuju dengan pandangan tersebut. Seperti Stephen L. Wasby⁷⁴ yang mengatakan bahwa:

An individual's identification with political party, although it remained quied stabil, did not mean be otomatically voted for that party, but identification was relevant to his evaluation of candidates positions and the stright of his identification was related to his vote decision.

(Identifikasi individu dengan partai politik, walaupun cukup stabil, tidak berarti secara otomatis memilih partai itu, tetapi identifikasi adalah relevan bagi penilaiannya terhadap posisi calon dan identifikasi nyata dihubungkan dengan keputusan memilihnya).

Jadi tidak selalu bahwa seseorang yang mengidentifikasi dirinya dengan partai Republik pasti akan memilih partai itu, karena identifikasi partai itu sendiri dapat berkembang (menguat dan melemah) sesuai dengan dinamika pengalaman sosialisasi politik seseorang. Nilai-nilai yang ditangkap seseorang dalam lingkungan keluarga, mungkin berbeda dengan nilai-nilai yang dialaminya dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan kelompok pergaulan, sehingga pengalaman sosialisasi nilai-nilai dalam kedua lingkungan yang terakhir akan mempengaruhi

⁷⁴Stephen L. Wasby, *Political Science : The Discipline and Its Dimention*, (New York: Charles Serebner's Sons, 1970), hlm. 312.

identifikasi partai yang telah tertanam dalam lingkungan keluarga, seperti yang telah disinyalir oleh Herbert Asher⁷⁵ : *Although the child usually acquires a partisan orientation at early age, this does not mean that these loyalties necessarily remain unchanged. As the child matures, he or she increasingly encounters new situations, for example, college and work-group in which the partisan cues may be vastly different from those of the child's house environment thereby creating pressures toward a change in identification. Likewise, as the child reach adulthood, more information is an acquired about the parties and their policies and candidates which may lead to switches from the child's original orientation.*

(Walaupun pada masa kecil biasanya memperoleh orientasi partisan pada usia lebih awal, hal itu tidak berarti bahwa loyalitas yang diperlukan tetap tidak berubah. Sebagai anak-anak, dia dengan cepat menemui keadaan-keadaan baru, misalnya, sekolah dan kelompok kerja dimana tanda-tanda partisan mungkin berbeda jauh dari hal yang sama di lingkungan rumahnya dengan demikian menciptakan tekanan terhadap perubahan identifikasi. Demikian juga, sebagai anak-anak yang tumbuh menjadi dewasa, lebih banyak informasi adalah belajar tentang partai dan kebijakannya dan calon yang mungkin memimpin membawanya putus dari orientasi orisinal masa kanak-kanak).

Dengan demikian, identifikasi partai seseorang itu dapat berkembang dan berubah. Perkembangan dan perubahan tersebut ditentukan oleh interaksi antara nilai-nilai yang tertanam sejak masa kanak-kanak dalam lingkungan keluarga dengan nilai-nilai lain yang dialami

⁷⁵Herbert Asher, *Op. Cit.*, hlm. 70.

dalam lingkungan sekolah dan kelompok pergaulan ketika dewasa.

Di samping itu, identifikasi partai dipengaruhi oleh isu yang sedang berkembang, seperti yang dikemukakan oleh John E. Chubb⁷⁶:

More reasons treatment have demonstrated in variety of way that party identification can indeed be a consequence of voter's reaction to issues and candidates at successive point in time. In other word, party clearly affects the choice of candidates, but candidates and issues also affect the choice of the party.

(Lebih banyak alasan yang menyenangkan telah menunjukkan dalam cara yang bervariasi bahwa identifikasi partai dapat sungguh-sungguh sebagai konsekuensi dari reaksi pemilih terhadap isu dan calon dalam masa yang berturut-turut. Dengan kata lain, partai dengan jelas mempengaruhi pilihan calon, tetapi calon dan isu juga mempengaruhi pilihan partai.)

Dari pendapat para pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa identifikasi partai itu dapat berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika pengalaman sosialisasi politik dan isu-isu yang berkembang dan juga berubah. Identifikasi partai itu akan menguat dan mempengaruhi perilaku memilih seseorang kalau isu-isu yang berkembang selaras dengan identifikasi partai yang telah tertanam sejak masa kanak-kanak. Sebaliknya, identifikasi partai tersebut akan melemah kalau isu-isu politik yang sedang berkembang itu bertentangan dengan identifikasi partai yang telah tertanam itu. Dengan kata lain, bahwa identifikasi partai itu akan mempengaruhi pilihan seseorang

⁷⁶John E. Chubb and Paul E. Peterson, *Op. Cit.*

terhadap partai yang bersangkutan apabila isu-isu politik yang berkembang tidak bertentangan dengan identifikasi partai yang telah tertanam itu.

Bagaimanapun, perilaku masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan akan sangat dipengaruhi dan bahkan ditentukan oleh sekelompok kecil pemimpin atau elit dalam masyarakat tersebut, merupakan faktor ketiga dan merupakan faktor utama, yang mempengaruhi masyarakat pedesaan dalam menentukan pilihan dalam pemilihan umum. Dalam hal ini Gaetano Mosca⁷⁷ menyatakan:

“dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk, satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama, yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua, yang jumlahnya jauh lebih besar diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama itu”.

Sejalan dengan pandangan di atas, masyarakat Jawa sering memandang masyarakatnya menjadi dua lapisan, yaitu “wong gedhe” (orang berpangkat atau orang terkemuka) dan “wong cilik” (orang kebanyakan). Wong gedhe biasanya dipandang sebagai pemimpin yang memiliki pola pandangan yang luas, misalnya memiliki orientasi pada kemajuan, memiliki pengetahuan yang luas, para pembuat keputusan yang efektif, dan memiliki otoritas di lingkungan masyarakatnya. Di pihak lain, wong cilik merupakan pengikut-pengikut yang bersifat pasif dan masa bodoh, yang dalam banyak hal semata-mata mengikuti

⁷⁷Mohtar Mas'oed dan Collin MacAndrews, *Op. Cit.*, hlm. 95.

para pemimpin atau mereka yang termasuk orang-orang terkemuka.

Stratifikasi masyarakat pedesaan Jawa seperti tersebut di depan secara singkat dapat dikatakan sebagai pemimpin dan pengikut atau rakyat. Para pengamat dan peneliti melukiskan hubungan antara pemimpin dan rakyat sebagai pola komunikasi dimana pemimpin selalu berperan sebagai figur dominan berhadapan dengan rakyat. Pola hubungan semacam ini disebut hubungan “*patron-client*” atau “Bapak-Anak Buah”.

Pola hubungan Bapak-Anak Buah ini juga dikenal dengan istilah “Bapakisme” yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut⁷⁸:

Bapak atau pemimpin memperoleh penghormatan secara mendalam, kasih sayang, kesetiaan, serta sokongan padu dari seluruh kaki tangan, pengikut ataupun murid. Begitu pula terhadap tindakan-tindakan yang hendak dilakukannya. Akan tetapi pada saatnya yang sama, pemimpin harus memberikan perlindungan (pengayoman) dan kesejahteraan kepada pengikutnya. Jika hal itu tidak dipenuhinya maka pengikut atau murid akan menarik loyalitasnya dengan cepat.

Yahya Muhaimin⁷⁹ menjelaskan “Bapakisme” sebagai berikut :

“Bapak selalu dipandang sebagai tumpuan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual serta pelepasan kebutuhan emosional sang anak. Bagi Bapak, anak buah dijadikan tulang punggung dan basis kekuatannya. Setiap

⁷⁸Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987).

⁷⁹Dalam Arbi Sanit, *Ibid.*

yang dilakukan Bapak akan dipatuhi dengan keastiaan sekalipun sampai mengorbankan jiwanya, Bapak harus di hormati, ditaati, dan pantang untuk ditentang”.

Sementara itu, dilukiskan pola hubungan Bapak-Anak Buah atau *patron client*, antara lain bahwa “Si pengikut yang tertekan keras secara ekonomi akan memperoleh nafkah dari si pemimpin, tetapi sebagai imbalan ia secara suka rela memberikan tenaganya, hak suaranya, dan dalam beberapa kasus bahkan nyawanya, sekalipun kewajiban tak pernah ditegaskan sewaktu menerima kebaikan hati yang semula. Si pemimpin dapat mendiktekan para pengikutnya menyertai suatu organisasi politik maupun menarik mereka keluar dari organisasi itu secara massal dengan informasi singkat.

Di samping hal di atas, Jakson juga memberikan gambaran kondisi dimana hubungan *patron client* akan terjadi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Patron dan klien, sekalipun tidak serupa kepentingan, pengetahuan, keterampilan dan kekuasaannya, harus mempunyai sifat saling melengkapi kepentingan-kepentingan secara umum, khususnya dalam bidang ekonomi.
- b. Permintaan patron harus lebih bersifat lunak ketimbang tak terbatas dan besarnya sesuai dengan jasa-jasa yang belum terlalu lama berselang ditunjukkan patron.

Pola kepemimpinan masyarakat pedesaan Indonesia seperti ini dapat lebih jelas diterangkan dengan mengikuti konsep kewibawaan karismatik. Landasan kepemimpinan karismatik adalah kepercayaan bahwa pemimpin memiliki ketetapan hati dan kualitas khas yang

berasal dari dirinya yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, seperti misalnya kekuatan supranatural..

Di dalam masyarakat pedesaan, tipe pemimpin seperti ini terbagi menjadi dua kelompok pemimpin, yaitu kelompok pemimpin formal seperti kepala kelurahan atau lurah dan para pembantunya, dan kelompok pemimpin informal yang terdiri dari terutama para pemuka agama dan adat. Dalam banyak kasus, para pemimpin informal memainkan peranan yang sangat berarti dalam mengarahkan masyarakat melebihi peranan pemimpin formal.

Ketiga faktor di atas, kepercayaan keagamaan (aliran), identifikasi partai (loyalitas kepartaian), dan kepemimpinan kiranya cukup untuk menganalisis perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris terhadap partai politik Islam, yang ditandai oleh perolehan suara partai politik Islam di kelurahan Air Tiris pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014, yang cenderung mengalami penurunan.

Dari pengamatan sementara, dengan mengamati secara cermat simbol-simbol dan tingkah laku keagamaan masyarakat, seperti banyaknya Masjid dan Musholla dengan intensitas kegiatannya yang relatif tinggi, terdapatnya pondok pesantren, banyaknya majelis-majelis taklim dan tokoh-tokoh keagamaan, secara garis besar masyarakat Air Tiris dapat dikategorikan sebagai masyarakat santri. Dari segi partisipasi politik dalam pemilihan umum, masyarakat Air Tiris relatif memperlihatkan dukungan mereka pada partai Islam. Sedangkan dari segi kepemimpinan, kelompok elit keagamaan mendominasi masyarakat Air Tiris. Namun kepentingan individual dari para pemuka masyarakat ini relatif bervariasi yang dapat mengakibatkan terganggunya

keutuhan struktur elit yang ada, terpecahnya kelompok elit akan diikuti terpecahnya massa.

Dengan kerangka teori yang telah dipaparkan di depan, untuk memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian ini, diajukan hipotesa sebagai berikut, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris terhadap partai politik Islam, di Air Tiris pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014, adalah, pertama, melemahnya pengaruh “politik aliran”, yaitu melonggarnya kaitan antara identitas agama dengan perilaku memilih, kedua, melemahnya identifikasi kepartaian yang ditandai oleh menurunnya loyalitas terhadap dukungan partai lama, dan ketiga, peran dominan elit politik. Munculnya partai-partai politik baru diikuti oleh menyebarnya elit masyarakat kelurahan Air Tiris.

1.6.2.5. Kepemimpinan, Simbol, Religiusitas, Rekrutmen dan Kampanye dalam Perilaku Politik

Terdapat hubungan kausalitas antara aspek kepemimpinan, simbol, religiusitas, rekrutmen dan kampanye dengan perilaku politik, termasuk perilaku memilih dalam pemilihan umum. Hubungan seperti itu juga terjadi pada masyarakat Air Tiris berkaitan dengan orientasi politiknya, perilaku memilihnya pada pemilihan umum legislatif tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Beberapa studi yang dilakukan oleh para peneliti menunjukkan hubungan tersebut.

Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, penelitian berjudul *Original Article Voice pitch influences voting behavior*⁸⁰ yang dilakukan oleh Cara C. Tigue, Diana J.

⁸⁰Evolution and Human Behavior 33 (2012) 210–216 Elsevier Inc. © 2012

Borak, Jillian J.M. O'Connor, Charles Schandl, David R. Feinberg Cara C. Tigue, Diana J. Borak, Jillian J.M. O'Connor, Charles Schandl, David R. Feinberg menunjukkan bahwa *candidates' voice pitch has an important influence on voting behavior and that men with lower-pitched voices may have an advantage in political elections*. Kemudian penelitian berjudul *The effects of crisis, cynicism about change, and value congruence on perceptions of authentic leadership and attributed charisma in the 2008 presidential election*⁸¹ yang dilakukan oleh Ethlyn A. Williams, Rajnandini Pillai, Bryan Deptula, Kevin B. Lowe menemukan bahwa *attributed charisma was found to have augmenting effects over authenticity in predicting voting behavior*. Sementara Michaela Mattes, Brett Ashley Leeds dan Royce Carroll melakukan penelitian dengan judul *Leadership Turnover and Foreign Policy Change: Societal Interests, Domestic Institutions, and Voting in the United Nations*⁸² menunjukkan bahwa *changes in source of leader support result in greater foreign policy redirection in nondemocracies than in democracies*.

Dalam kaitannya dengan simbol, penelitian Michael Bruter yang berjudul *winning hearts and minds for Europe : The Impact of News and Symbols on Civic and Cultural European Identity*⁸³ menunjukkan adanya *the strong impact of symbols and news on European identity and the predominant effect of symbols on cultural identity and news on civic identity*. Kemudian penelitian dengan judul *The Hybrid Media Consumption: How Tweeting During a Televised Political Debate Influences Vote Decision*⁸⁴ yang dilakukan oleh Misa Maruyama, Scott P. Robertson, Sara

⁸¹© 2011 Elsevier Inc.

⁸²“The International Politics of Autocracies” workshop at Rice University, May 3-5, 2012, “The International Politics of Autocracies” workshop at Rice University, May 3-5, 2012,

⁸³ London School of Economics and Political Science

⁸⁴ Information and Computer Sciences Department University of Hawai‘i at Mānoa Honolulu, HI 96822 USA Information and Computer Sciences Department University of Hawai‘i at Mānoa Honolulu, HI 96822 USA

Douglas, Bryan Semaan, dan Heather Faucett menunjukkan bahwa *People who actively tweeted changed their voting choice to reflect the majority sentiment on Twitter. Results are discussed in terms of the possibility that active tweeting leads to greater engagement but that it may also make people more susceptible to social influence.* Sementara itu dalam penelitiannya yang berjudul *Symbols, Signals, and Social Norms in Politics and the Law*, Eric A. Posner⁸⁵ menemukan bahwa *The use of the law is likely to have unpredictable effects because of multiple equilibria and of the sensitivity of behavior to parameters, but it occurs frequently because lobbying and other actions that influence law making can become signals themselves, and the law is simply an equilibrium outcome.*

Dalam kaitannya dengan religiusitas, penelitian berjudul *Shades of Faith: Religious Foundations of Political Attitudes among African Americans, Latinos, and Whites*⁸⁶ yang dilakukan oleh Brian D. McKenzie, menunjukkan bahwa *conservative Christianity is consistently associated with less tolerant and less egalitarian views among whites. Religious African Americans and Latinos, however, hold more equitable opinions about disadvantaged individuals.* Berikutnya adalah penelitian berjudul *Religion and Redistributive Voting in Western Europe*⁸⁷ yang dilakukan oleh Daniel Stegmueller menemukan *bahwa the redistributive vote of religious individuals is primarily based on economic not moral preferences.* Sementara, Sonia Bhalotra⁸⁸ dalam penelitiannya yang berjudul *Religion, Politician Identity and Development Outcomes: Evidence from India*, menunjukkan bahwa *increasing the political representation of Muslims improves health and education outcomes in the district from which the legislator is elected.* Dia juga menemukan bahwa *no evidence of religious*

⁸⁵ London School of Economics and Political Science

⁸⁶ American Journal of Political Science, Vol. 57, No. 1, January 2013, Pp. 218–235 C 2012, Midwest Political Science Association

⁸⁷ [Responsitory.essex.ac.uk/12114/1/ReligRedistVote_web.pdf](http://responsitory.essex.ac.uk/12114/1/ReligRedistVote_web.pdf)

⁸⁸ <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:12175239>

favoritism: Muslim children do not benefit more from Muslim political representation than children from other religious groups.

Dalam kaitannya dengan rekrutmen, penelitian berjudul *Recruitment and Representation of Ethnic Minorities under Proportional Representation Evidence from Bulgaria* yang dilakukan oleh Oleh Protsyk, menemukan bahwa *the failures of demographically large ethnic groups to secure close-to-proportional representation under Bulgaria's choice of PR electoral system*. Peneliti juga menemukan bahwa *identify costs in terms of reduced competitiveness and accountability that PR-facilitated electoral success of ethnic minority parties can impose on minority constituencies*⁸⁹. Kemudian dalam penelitian berjudul *Integrating Social Identity and the Theory of Planned Behavior : Predicting Withdrawal from an Organizational Recruitment Process*⁹⁰, Brian K. Griepentrog, Ph.D, Harold, Ph.D, Richard J. Klimoski, Ph.D Brian C. Holtz, Ph.D dan Sean M. Marsh, Ph.D mengemukakan bahwa *this study develops and tests a model of applicant withdrawal. Drawing on tenets from social identity theory and the theory of planned behavior, this study proposes that applicants who highly identify with an organization will experience higher pursuit intentions and subsequently be less inclined to withdraw from recruitment. Implications for research and practice will be discussed*. Sementara itu penelitian berjudul *Notable Networks: Elite Recruitment, Organizational Cohesiveness, and Islamist Electoral Success in Turkey*⁹¹, yang dilakukan oleh Feryaz Ocakli menunjukkan bahwa penelitian ini *identifies the important role of local elite recruitment and organizational cohesiveness in Islamist electoral performance, dimana the findings bridge the literatures on*

⁸⁹East European Politics and Societies Volume XX Number X Month XXXX
xx-xx © 2010

⁹⁰ Personnel Psychology 2012, 65, 723–753

⁹¹ Politics & Society 2015, Vol. 43(3) 385–413 © 2015 SAGE Publications
Reprints and permissions

political Islam and party politics with a new theory of Islamist electoral strategy and performance.

Dalam kaitannya dengan kampanye, penelitian berjudul *Two Sides of the Coin: Assessing the Influence of Social Network Site Use During the 2012 U.S. Presidential Campaign*⁹² yang ditulis oleh Weiwu Zhang , Trent Seltzer , and Shannon L. Bichard, menemukan bahwa *the increasing popularity of social network sites (SNSs) in election campaigns provides a unique climate for scholarly inquiry. The study reported here builds and investigates the impact of different types of SNS use on voters' attitudes and behavior during the 2012 U.S. presidential campaign. Sites such as Facebook, Google Plus, Twitter, and YouTube are included to offer a robust assessment of distinct relationships. A national online panel of Internet users was utilized to examine reliance on SNSs and the multiple consequences on political attitudes and behavior such as political participation, political interest, selective exposure, selective avoidance, and strength of party affiliation.* Selanjutnya, penelitian berjudul *Which candidates do the public discuss online in an election campaign?: The use of social media by 2012 presidential candidates and its impact on candidate salience*, yang dilakukan oleh Sounman Hong dan Daniel Nadler⁹³, menunjukkan *that while social media does substantially expand the possible modes and methods of election campaigning, high levels of social media activity on the part of presidential candidates have, as of yet, resulted in minimal effects on the amount of public attention they receive online.* Sementara, penelitian berjudul *Elections*

⁹² Social Science Computer Review 31(5) 542-551 ^a The Author(s) 2013
Reprints and permission

⁹³ Contents lists available at SciVerse ScienceDirect Government
Information Quarterly journal homepage: www.elsevier.com/locate/govinf

*and Deceptions*⁹⁴ dari Luca Corazzini, Sebastian Kubez dan Michel Andre, menunjukkan bahwa *candidates are more benevolent when they are elected democratically than when they are appointed exogenously*. Lebih lanjut menunjukkan bahwa *candidates are all the more likely to serve the public interest, the higher their approval rates*.

1.7. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian dikenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian tentang perilaku memilih, orientasi politik masyarakat pedesaan dalam pemilihan umum ini merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif yang saling melengkapi. Pada dasarnya penelitian kualitatif memberikan penjelasan terhadap fenomena data kualitatif dalam bentuk data primer maupun data sekunder, sementara penelitian kuantitatif bermula pada kualifikasi data kuantitatif melalui analisa kuantitatif.

Penelitian yang dilaksanakan pada masyarakat Air Tiris, kecamatan Kampar, kabupaten Kampar, provinsi Riau merupakan penelitian campuran kualitatif dan kuantitatif dengan analisa deskriptif maupun eksplanatif. Metode penelitian kualitatif terdiri dari sumber dan pengumpulan data, informan, teknik pengumpulan data, analisa dan pengolahan data dan sistematika penulisan, sedangkan penelitian kuantitatif menganalisa data kuantitatif melalui analisa kuantitatif dari sejumlah sampel dengan instrumen penelitian yang ditentukan.

⁹⁴ Department of Econometrics and Center for Economic Research Tilburg University y November 17, 1998 Department of Econometrics and Center for Economic Research Tilburg University y November 17, 1998

1.7.1. Sumber dan Pengumpulan Data

Sumber data ialah asal usul data, baik yang bersifat langsung (primer) dan tidak langsung (sekunder) yang dapat menjadi argumen dalam menjawab permasalahan-permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari informan terpilih. Data yang diperoleh langsung dari informan ini berhubungan dengan:

- i. Sikap masyarakat kelurahan Air Tiris kecamatan Kampar terhadap agama Islam dalam kaitannya dengan kehidupan politik. Apakah keberagaman (Islam) masyarakat berpengaruh signifikan dalam menentukan orientasi politik, pilihan masyarakat dalam pemilihan umum.
- ii. Pola hubungan kemasyarakatan antara elit dengan massa yang berhubungan dengan keputusan memilih masyarakat dalam pemilihan umum. Sejauh mana keputusan memilih masyarakat kelurahan Air Tiris kecamatan Kampar mengikuti kemana elit menentukan pilihannya dalam pemilihan umum.
- iii. Pola rekrutmen fungsionaris partai politik, terutama partai-partai Islam di kelurahan Air Tiris. Sejauh mana partai politik berhasil menempatkan para elit dalam jajaran fungsionaris partai.
- iv. Pola kampanye partai politik, terutama partai politik Islam pada pemilihan umum. Kegiatan dan jenis-jenis kampanye partai politik menghadapi pemilihan umum.
- v. Semua data yang diperoleh langsung berdasarkan wawancara mendalam dengan berbagai informan berhubungan dengan dinamika kehidupan politik

dalam pemilihan umum, tentang institusi politik, dan perubahan struktur dan budaya politik.

c. Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dan telah diolah oleh pihak kedua atau data yang bersumber dari institusi pemerintah dan swasta yang terkait dengan:

- i. Profil kelurahan Air Tiris, kecamatan Kampar, kabupaten Kampar.
- ii. Profil institusi politik setempat (legislatif dan eksekutif), media massa, partai politik dan kelompok kepentingan.
- iii. Berbagai peraturan perundang-undangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkait dengan kehidupan politik, termasuk kehidupan politik di pedesaan.
- iv. Semua data yang diperoleh berdasarkan hasil olahan pihak kedua atau yang bersumber dari institusi pemerintah atau swasta berhubungan dengan kehidupan politik Indonesia, terutama yang berhubungan dengan kehidupan politik pedesaan dalam perubahan struktur-fungsi dan budaya politik di Indonesia, termasuk kehidupan politik pedesaan.

1.7.2. Informan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menentukan informan ialah metode bertujuan (purposif). Yaitu suatu metode yang digunakan berdasarkan pada kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan kefahaman secara akademik informan sesuai tujuan penelitian yang ditentukan. Adapun informan yang akan memberikan data

melalui wawancara mendalam, sesuai dengan keperluan, ialah; para tokoh masyarakat, baik tokoh formal maupun tokoh informal, terutama masyarakat kelurahan Air Tiris. Kemudian para fungsionaris partai politik, terutama fungsionaris partai politik kecamatan Kampar dan kelurahan Air Tiris. Lebih khusus para fungsionaris partai-partai politik Islam. Di samping itu, informan, berdasarkan kebutuhan, juga berasal dari tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh media setempat, pakar politik, tokoh agama beserta unsur-unsur tokoh masyarakat, termasuk tokoh adat, dan anggota masyarakat.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ialah:

a. Penelitian Lapangan

Metode penelitian lapangan ialah pengamatan langsung yang dilakukan peneliti ke lokasi penelitian untuk mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan tujuan penelitian yaitu mengenai dinamika kehidupan partai politik dan perubahan orientasi politik terhadap partai politik Islam pada masyarakat kelurahan Air Tiris yang berhubungan dengan dengan pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014.

b. Wawancara

Metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan secara langsung kepada informan terpilih. Wawancara mendalam dengan informan dimaksudkan agar peneliti dapat menerima berbagai informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, hasil penelitian, dokumen peraturan perundang-undangan pemerintah, data statistik beserta data pendukung lainnya yang telah diolah oleh pihak kedua yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

1.7.4. Analisa Data

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisa campuran antara metode induktif dan metode deduktif, dengan berpedoman pada kerangka teori dan kecenderungan data yang diperoleh, baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Dengan demikian maka analisa yang digunakan cenderung pada bentuk analisa kualitatif.

Dalam penelitian ini analisa data dilakukan dengan metode deskriptif analisis kualitatif. Yaitu analisis data yang diperoleh melalui wawancara mendalam untuk ditranskrip, disusun mengikut aturan sesuai hasil wawancara. Analisis dilakukan dengan meneliti informasi yang dikemukakan informan. Kemudian, data disusun, diterjemahkan maknanya serta diuji hubungannya sesuai dengan tujuan penelitian ini maupun informasi yang berasal dari sumber data sekunder untuk dianalisis lebih lanjut.

Penelitian ini dapat dimasukkan dalam tipe penelitian yang bersifat analisis verifikasi karena penelitian ini mencoba menerangkan gejala-gejala perubahan perilaku politik, perubahan orientasi politik, yang ditemukan melalui verifikasi teori-teori yang digunakan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa penelitian ini hanya membenarkan ataupun membantah teori. Aplikasi pendekatan struktur-fungsional di level institusi menemukan bahwa akan dilihat

perubahan struktur elit dan fungsi politik di kelurahan Air Tiris, terutama sejak pemilihan umum 2004, misalnya, dengan melihat pengukuran sebagai berikut: pada pemilihan umum 1999 dan 2004 struktur elit pendukung partai-partai politik Islam masih kelihatan soliditas yang tinggi, namun tidak demikian halnya pada pemilihan umum 2009 dan 2014 di mana elit partai-partai politik Islam telah menyebar dan mendukung partai-partai politik lain. Demikian juga pada kegiatan kampanye menghadapi pemilihan umum. Pada pemilihan umum 1999 dan 2004 kegiatan kampanye partai-partai politik Islam memperlihatkan intensitas yang tinggi, namun tidak demikian halnya pada pemilihan umum 2009 dan 2014 di mana kegiatan kampanye partai-partai politik Islam tidak memperlihatkan kesemarakannya yang memberikan kesan partai besar dan menarik.

Data yang dikumpulkan dibatasi pada kurun waktu pemilihan umum masa pemerintahan reformasi, terutama mulai tahun 1999 di mana pada tahun tersebut dilaksanakan pemilihan umum pertama pemerintah reformasi sampai dengan tahun 2014, pemilihan umum keempat pada era reformasi.

Data yang dikumpulkan dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu: data sekunder dan data primer. Penelitian ini bertumpu pada data primer dan data sekunder yang saling melengkapi secara proporsional. Data primer akan diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan, sesuai dengan keperluan dengan *snowball process*, tanpa membatasi dengan jumlah tertentu, informan yang terdiri dari para tokoh di kabupaten Kampar, kecamatan Kampar dan kelurahan Air Tiris. Informan terdiri dari: fungsionaris partai politik, terutama partai-partai politik Islam kecamatan Kampar dan

kelurahan Air Tiris. Di samping itu juga, sesuai keperluan, para tokoh formal dan tokoh informal di kecamatan Kampar dan kelurahan Air Tiris.

Pengolahan data dilakukan dengan analisis kualitatif. Analisis yang dilakukan ini bersifat historis komparatif yaitu menganalisis data dan informasi yang telah lampau, yaitu membandingkan data informasi pada masa pemilihan umum pertama 1999 sampai pemilihan umum ke empat 2014 pada masa pemerintahan reformasi. Penelitian lapangan secara intensif dilakukan sejak tahun 2004 hingga 2014, kemudian dilanjutkan pada tahun 2014 sampai tahun 2016.

Data yang terkumpul dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu data primer dan sekunder. Namun penelitian ini akan lebih bertumpu pada data primer yang dikumpul melalui metode wawancara mendalam. Data primer akan diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap sejumlah informan dari para pemimpin masing-masing institusi masyarakat (*informal*) dan pemimpin formal (pejabat pemerintah), fungsionaris partai politik, terutama partai politik Islam, dan juga masyarakat pemilih pada pemilihan umum.

Informan terdiri daripada para fungsionaris partai politik, terutama partai-partai politik Islam, untuk mengetahui sikap partai politik, strategi rekrutmen yang dilakukan, serta strategi kampanye pada pemilihan umum era reformasi, pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014. Materi yang sama juga diupayakan diperoleh dari para tokoh formal maupun tokoh informal.

1.7.5. Teknik Wawancara

Untuk melengkapi argumen tentang perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris perlu dilakukan wawancara dengan masyarakat Air Tiris. Untuk memperoleh argumen ini dilalui tahapan antara lain, Teknik Penentuan Besarnya Sampel, Teknik Pengambilan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Daftar Pertanyaan dan Instrumen Penelitian yang dapat dilihat dalam lampiran.

Teknik Penentuan Besarnya Sampel
Rumus Frank Lynch :

$$n = \frac{NZ^2.P(1-P)}{Nd^2+Z^2.P(1-P)}$$

Ket. :

n = Jumlah sampel yang diambil

N = Jumlah populasi yang ada

Z = Nilai normal variabel (1,96) untuk tingkat kepercayaan 95%

P = Harga patokan tertinggi

D = Sampling error

Dengan rumus ini maka besarnya sampel dalam penelitian ini adalah :

$$\begin{aligned} n &= \frac{NZ^2.P(1-P)}{Nd^2+Z^2.P(1-P)} \\ &= \frac{3.536 (1,96)^2 \cdot 0,50 (1-0,50)}{3.536 (0,10)^2 + (1,96)^2 \cdot 0,50 (1-0,50)} \\ &= \frac{3.536 (3,8416) \cdot 0,50 (0,50)}{3.536 (0,01) + (3,8416) \cdot 0,50 (0,50)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{13583,8976 \cdot 0,25}{35,36 + 3,8416 (0,25)} \\
&= \frac{3395,974400}{35,36 + 0,960400} \\
&= \frac{3395,974400}{36,2204} \\
&= 93,758611 \\
&= 94 \text{ (dibulatkan)} \\
&= 100 \text{ (dibulatkan)}
\end{aligned}$$

Teknik Pengambilan Sampel. Untuk mengambil sampel 100 dari populasi sebesar 3.536 orang, menggunakan *teknik systematic area random sampling* (teknik pengambilan sampel secara random dan sistematis sesuai dengan besarnya populasi masing-masing area/RW). Kelurahan Air Tiris terbagi menjadi enam RW, yaitu RW 01 terdiri dari 594 orang, RW 02 terdiri dari 592 orang, RW 03 terdiri dari 572 orang, RW 04 terdiri dari 598 orang, RW 05 terdiri dari 576 orang dan RW 06 terdiri dari 604 orang.

Untuk menentukan besarnya sampel masing-masing RW, menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Np = \frac{\text{Jumlah pemilih tiap RW}}{\text{Jumlah pemilih keseluruhan}} \times \text{sampel}$$

Sampel masing-masing RW dapat dihitung sebagai berikut :

$$1. \text{ RW 01} \quad = \frac{594 \times 100}{3.536} = 16,79 = 17 \text{ orang}$$

2. RW 02 = $\frac{592 \times 100}{3.536} = 16,74 = 17$ orang
3. RW 03 = $\frac{572 \times 100}{3.536} = 16,17 = 16$ orang
4. RW 04 = $\frac{598 \times 100}{3.536} = 16,91 = 17$ orang
5. RW 04 = $\frac{576 \times 100}{3.536} = 16,28 = 16$ orang
6. RW 04 = $\frac{604 \times 100}{3.536} = 17,08 = 17$ orang

Untuk mengambil sejumlah sampel yang telah ditentukan menggunakan teknik pengambilan sampel secara sistematis dengan menggunakan jumlah pemilih yang terdaftar dan telah menggunakan hak pilihnya dengan memperhatikan perbandingan laki-laki dan perempuan, dihasilkan sampel (responden) masing-masing RW pada tabel 1.4. berikut :

Tabel 1.4.
Jumlah Responden di masing-masing RW

No.	RW	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	01	8	9	17	17
2	02	8	9	17	17
3	03	8	8	16	16
4	04	8	9	17	17
5	05	7	9	16	16
6	06	8	9	17	17
	Jumlah	47	53	100	100

Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mewawancarai dan menyebarkan sejumlah pertanyaan (*questionnaire*) kepada sejumlah responden yang telah ditentukan. Responden dipilih yang sebelumnya memilih partai Islam kemudian pada pemilu berikutnya berpindah memilih partai non Islam pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014.⁹⁵

Teknik Analisa Data. Analisa data yang digunakan dalam analisa ini adalah Statistik Deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan. Disamping statistik deskriptif, juga akan dilakukan analisis korelasi sehingga analisa yang dilakukan lebih menyeluruh.

1.7.5. Sistematika Penulisan

Setelah mengemukakan latar belakang dan permasalahan penelitian mengenai keberadaan partai-partai politik Islam di kelurahan Air Tiris yang mengalami perubahan perolehan suara cukup unik yang menunjukkan telah terjadi perubahan orientasi politik masyarakat terhadap partai politik Islam, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan pada bab I sebagai pendahuluan, bab II memaparkan dinamika politik di lokasi penelitian, yang meliputi kondisi sosial-

⁹⁵ Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2016, 93 (Skala Likert), 147 (Analisa data Statistik Deskriptif),.

budaya masyarakat, dan basis sosial partai-partai politik. Juga memaparkan kondisi geografi dan demografi, kondisi sosial budaya menyangkut struktur sosial, norma-norma dalam kehidupan, dan kondisi elit, sedangkan basis sosial partai politik menyangkut gambaran massa dari masing-masing partai, terutama partai-partai politik Islam.

Bab III membicarakan tentang partai-partai politik dan perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris terhadap partai-partai politik Islam, yang meliputi proses dan perkembangan serta eksistensinya. Bab IV merupakan inti bahasan, berisi pembahasan yang mengarah kepada intensitas pengaruh “politik aliran”, kepercayaan keagamaan, identifikasi kepartaian, loyalitas kepartaian, dan peranan kelompok elit dalam perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris terhadap partai-partai Islam, keputusan memilih masyarakat kelurahan Air Tiris dalam pemilihan umum. Pembahasan ketiga variabel di atas dikaitkan dengan pengaruh azas, karakter, pengaruh lambang, rekrutmen kepemimpinan dan strategi kampanye, dan memaparkan hasil penghitungan suara pada masing-masing pemilihan umum dalam usaha menemukan faktor-faktor penyebab perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris terhadap partai-partai Islam pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014. Sebagai bab terakhir, bab V, memaparkan ringkasan temuan teoritik dari penelitian yang merupakan inti sari dari bab II sampai bab IV.

1.7.7. Publikasi Ilmiah

Beberapa karya ilmiah peneliti telah dipublikasikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam bentuk artikel jurnal ilmiah di antaranya:

1. Penelitian disertasi berjudul “Perubahan Orientasi Politik Masyarakat Air Tiris Kampar Riau dalam Pemilihan Umum terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus Pemilihan Umum 1999, 2004, 2009 dan 2014) ini dipublikasikan dan diterbitkan pada Jurnal Internasional *International Journal of Law and Management*, dengan judul *Political Orientation Change of Air Tiris Society of Kampar Riau in General Election on Islamic Political Party (Case Study of Public Election of 1999, 2004, 2009 and 2014)*.
Jurnal Internasional *International Journal of Law and Management* terbit di Inggris, United Kingdom, *Subject Area and Category : Business, Management and Accounting, Organizational Behavior and Human Resource Management, Social Sciences Law. Publisher : Emerald Group Publishing Ltd. Publication Type : Journals. ISSN :1754243X. Coverage : 2013-ongoing.*
Surat keterangan penerimaan, *Letter of Acceptance (LoA)* untuk penelitian disertasi ini dapat dilihat di Lampiran 4.
2. Peran Greenpeace dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara dan Air) di China (Jurnal Transnasional, ISSN 2085-3246, Pekanbaru, Februari 2015, Vol 6, No. 2 Hal 1662-1674)
3. Konflik tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar (Jurnal Transnasional ISSN 2085-3246, Pekanbaru, februari 2013, Vol 4, No 2, Hal 834-847)